

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KEUANGAN DAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
(BEI) TAHUN 2019-2023**

(The Effect Of Independent Commissioners, Institutional Ownership, and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance of Financial and Banking Sub Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Sarjana

Disusun oleh :

MARIA MARGARETTY BR PASARIBU
21412037



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
BANDAR LAMPUNG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

TAHUN 2019-2023

(*The Effect Of Independent Commissioners, Institutional Ownership, and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance of Financial and Banking Sub Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023*)

Yang diajukan oleh

MARIA MARGARETTY BR PASARIBU
21412037

Telah disetujui

Tanggal 31 Oktober 2024

Mengetahui,
Program Studi S1 Akuntansi
Ketua,

Dr. Tri Darma Rosmala Sari, S.E., M.S.Ak. **Marsi Fella Rizki, SE., M. Ak., CRA**
NIK. 022 09 10 06 NIK. 021 22 08 02

Disetujui,
Pembimbing,

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

TAHUN 2019-2023

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MARIA MARGARETTY BR PASARIBU

21412037

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana
Tanggal 31 Oktober 2024

Dewan Pengaji

Pengaji,

Pembimbing,

Marsi Fella Rizki, SE., M. Ak., CRA
NIK. 021 22 08 02

Wulan Rezky Amalya, S.Ak., M.Ak.
NIK. 021 21 02 05



Dr. H. Mahathir Muhammad, S.E., M.M. Dr. Tri Darma Rosmala Sari, S.E., M.S.Ak.
NIK. 023 05 00 09 NIK. 022 09 10 06

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,
Program Studi S1 Akuntansi
Ketua,

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Margarety Br Pasaribu

Npm : 21412037

Program Studi : SI Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa laporan skripsi

Judul: : "Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Keuangan dan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023"

Pembimbing : Marsi Fella Rizki, SE., M. Ak., CRA

Belum pernah diajukan untuk diuji sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar akademik pada berbagai tingkat Universitas/Perguruan Tinggi manapun. Tidak ada bagian dalam skripsi ini yang pernah dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali yang digunakan sebagai referensi, berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang benar.

Apabila dikemudian hari ternyata laporan tugas akhir yang saya tulis terbukti hasil saduran/plagiat, maka saya akan bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 31 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Maria Margarety Br Pasaribu
NPM. 21412037

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Margarety Br Pasaribu
NPM : 21412037
Program Studi : Akuntansi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Program Studi S1 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019-2023” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

Yang menyatakan,

Maria Margarety Br Pasaribu
NPM. 21412037

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kaunia-Nya, penulisan skripsi ini dapat dirampungkan. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih ini kepada :

1. Tuhan YME atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Dr. HM. Nasrullah Yusuf, S.E., MBA. selaku Rektor Universitas Teknokrat Indonesia.
3. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., CA., Akt. selaku Ketua Yayasan Universitas Teknokrat Indonesia.
4. Bapak Dr. H. Mahathir Muhammad, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia.
5. Ibu Dr. Tri Darma Rosmala Sari, S.E., M.S.Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia.
6. Ibu Marsi Fella Rizki S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah mendampingi dan memberikan masukan dalam penggerjaan skripsi ini.
7. Ibu Wulan Rezky Amalya, S.Ak., M.Ak. selaku Dosen Penguji.
8. Segenap dosen Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis.
9. Orang tua, keluarga, serta rekan-rekan seperjuangan yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan sampai penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Almamater penulis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Penelitian	8
1.6 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	12
2.1.3 Komisaris Independen	13
2.1.4 Kepemilikan Institusional	14
2.1.5 Kompensasi Rugi Fiskal	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
2.3 Kerangka Pemikiran	22
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	23
2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	23
2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	24

2.4.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Definisi Operasional Variabel	27
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
3.3.1 Populasi.....	29
3.3.2 Sampel	33
3.4 Teknik Analisis Data	35
3.4.1 Uji Statistik Deskriptif	36
3.4.2 Regresi Data Panel.....	36
3.4.2.1 Common Effect Model	37
3.4.2.2 Fixed Effect Model.....	37
3.4.2.3 Random Effect Model	38
3.4.3 Metode Pemilihan Model.....	38
3.4.3.1 Uji Chow	39
3.4.3.2 Uji Hausman.....	39
3.4.3.3 Uji Lagrange Multiplier.....	40
3.4.4 Uji Asumsi Klasik.....	40
3.4.4.1 Uji Multikolinieritas	41
3.4.4.2 Uji Heterokedastisitas.....	42
3.4.4.3 Uji Autokorelasi	42
3.4.5 Uji Hipotesis	43
3.4.5.1 Uji Parsial (Uji t)	43
3.4.5.2 Uji Simultan (Uji F).....	44
3.4.5.3 Uji Koefesien Determinasi (R^2).....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	45
4.2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	45
4.3 Regresi Data Panel	47
4.3.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel	47
4.3.1.1 Hasil Uji Chow	47
4.3.1.2 Hasil Uji Hausman	48
4.3.1.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier	49
4.3.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	49

4.4	Uji Asumsi Klasik	51
4.4.1	Uji Multikolinearitas.....	51
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas	52
4.5	Uji Hipotesis	53
4.5.1	Uji Parsial (Uji t).....	53
4.5.2	Uji Simultan (Uji f).....	54
4.5.3	Uji Koefesien Determinasi.....	54
4.6	Pembahasan	55
4.6.1	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	55
4.6.2	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	56
4.6.3	Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Implikasi Penelitian	59
5.3	Keterbatasan Penelitian	60
5.4	Saran Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62	
LAMPIRAN	67	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2023	2
Tabel 2. 1 Daftar Penelitian-Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3. 1 Tabel Operasional Variabel	28
Tabel 3. 2 Daftar Populasi Perusahaan Sektor Keuangan dan Perbankan.....	29
Tabel 3. 3 Kriteria pemilihan sampel	33
Tabel 3. 4 Daftar Sampel Nama Perusahaan Sektor Keuangan dan Perbankan .	34
Tabel 3. 5 Tabel Pemilihan Model.....	38
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	45
Tabel 4. 2 Hasil Uji <i>Chow</i>	48
Tabel 4. 3 Hasil Uji <i>Hausman</i>	48
Tabel 4. 4 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	49
Tabel 4. 5 Model Regresi Data Panel	50
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas.....	52
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52
Tabel 4. 8 Hasil Uji Parsial (Uji t)	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan (Uji f)	54
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefesien Determinasi	55
Tabel 4. 11 Tabel Hubungan Variabel Independen terhadap Tax Avoidance....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	23
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Daftar Perhitungan Komisaris Independen.....	67
LAMPIRAN 2 : Daftar Perhitungan Kepemilikan Institusional	70
LAMPIRAN 3 : Daftar Perhitungan Kompensasi Rugi Fiskal	73
LAMPIRAN 4 : Data Perhitungan CETR	75
LAMPIRAN 5 : Data Siap Olah.....	78
LAMPIRAN 6 : Data-Data Yang Dibuang Dari Outlier.....	85
LAMPIRAN 7 : Hasil Olah Data Sebelum Dilakukan Outlier	92
LAMPIRAN 8 : Hasil Olah Data Setelah Dilakukan Outlier.....	95

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya di subsektor keuangan dan perbankan, selama periode 2019-2023. Metodologi yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai variabel dependen yang mengukur tingkat penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan aplikasi *Eviews12* untuk melakukan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memberikan peluang untuk penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel lain yang mungkin lebih relevan dalam mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan agar perusahaan di sektor keuangan dan perbankan lebih efektif dalam memanfaatkan fungsi kepemilikan institusional, serta memperkuat peran komisaris independen dalam mengawasi kebijakan perpajakan. Keterbatasan dari penelitian ini meliputi fokus pada tiga variabel independen dan periode waktu yang terbatas, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan variabel lain, termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, serta mencakup sektor industri yang lebih luas untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai *tax avoidance*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan masalah yang terus menarik perhatian di kalangan regulator, akademisi, maupun praktisi bisnis di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut laporan *Tax Justice Network* dalam *The State of Tax Justice* (2020), diprediksi bahwa Indonesia kehilangan pendapatan pajak mencapai US\$ 4,86 miliar setiap tahun, atau setara dengan 69,1 triliun rupiah akibat *tax avoidance*. Masalah ini menjadi lebih serius di negara-negara berkembang, di mana perlindungan terhadap pemegang saham minoritas cenderung lebih lemah, dan penegakan hukum tidak sekuat di negara maju. Kondisi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* tanpa menghadapi konsekuensi yang berarti (Wang *et al.*, 2020). Praktik *tax avoidance* kerap dimanfaatkan oleh perusahaan dengan tujuan meminimalisasi beban pajak melalui cara-cara yang legal namun kontroversial dari segi etika dan berdampak pada penerimaan pajak yang mempengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan suatu negara.

Di Indonesia, *tax ratio* masih tergolong rendah diurutkan dengan negara-negara anggota OECD di Asia Tenggara. *Tax ratio* merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur efektivitas sistem perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai perbandingan negara Vietnam, Filipina dan Kamboja, memiliki *tax ratio* diatas 18% disusul Thailand sebesar 16,4% dan diikuti oleh Singapura dan Malaysia dengan *tax ratio* diatas 11%, sedangkan *tax ratio* Indonesia tercatat hanya sebesar 10,9%, yang menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dalam sistem perpajakan, terutama dalam upaya mengurangi *tax avoidance* (OECD, 2023).

Partisipasi Wajib Pajak sangat penting supaya pemerintah bisa mengelola ekonomi dengan efektif. Hal tersebut dicerminkan melalui peraturan UU No. 28 Tahun 2007 yang direvisi oleh UU No. 5 Tahun 2008, yaitu pajak adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Sebagai respon terhadap dampak pandemi *Covid-19*, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Salah satu kebijakan penting yang diatur dalam peraturan ini adalah penurunan tarif pajak badan, dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta lebih lanjut menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Selain itu, perusahaan terbuka yang memenuhi syarat tertentu dapat menikmati tarif pajak yang lebih rendah lagi, yaitu 3% di bawah tarif standar. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2023

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Target	1489,2	1539,2	1472,7	1618,1	1786,4	1332,7	1444,5	1783,9	2021,2
Realisasi	1240,4	1285	1343,5	1521,4	1545,3	1642,6	1547,8	2034,5	2155,4
Capaian (%)	83%	83%	91%	94%	87%	123%	107%	114%	107%

Sumber : Diolah dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (2024), (Triliunan Rupiah)

*) *Realisasi sementara menunggu audit LKPP 2023*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pusat (2024) selama periode 2015 hingga 2023, target penerimaan pajak mengalami kenaikan secara bertahap, dengan puncaknya pada tahun 2023 sebesar 2021,2 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak cenderung fluktuatif, dengan beberapa tahun menunjukkan capaian di bawah target, seperti pada tahun 2015 hingga 2019, dan beberapa tahun dengan realisasi yang melampaui target, seperti pada tahun 2020 hingga 2023. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2022, di mana realisasi pajak mencapai 114% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak mulai menunjukkan hasil, terutama dengan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan reformasi perpajakan yang diimplementasikan setelah tahun 2020. Namun realisasi target penerimaan pajak hingga periode 2023 menunjukkan masih ada kesenjangan antara target dan realisasi yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, yang menandakan kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*.

Meski demikian, tantangan untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak tetap ada, terutama dalam mengatasi potensi *tax avoidance* yang masih dilakukan oleh beberapa perusahaan. Beberapa tahun sebelumnya, Indonesia digemparkan dengan kasus suap pajak yang mencuat tahun 2021, yang melibatkan mantan direktur pemeriksaan dan penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2016-2019, Angin Prayitno menerima suap dan gratifikasi mencapai 50 miliar rupiah dari tiga perusahaan, yaitu PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Bank Pan Indonesia (Kompas.com). Kasus lainnya di tahun 2023, melibatkan Suparman melalui PT. Vinoli Antarnusa Indah, yang diduga tidak melaporkan nilai pajak dengan benar dan mengakibatkan kerugian negara sebanyak 8,3 miliar rupiah (Yogyapos.com). Kasus terbaru di tahun yang sama kembali melibatkan pejabat eselon III DJP Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo atas dugaan menerima suap dan gratifikasi terkait konsultasi pajak terhadap PT Apexindo Pratama Duta, PT Birotika Semesta dan PT Airfast (detiknews.com). Selain itu Rafael Alun Trisambodo melakukan sejumlah pelanggaran integritas dengan tidak melaporkan harta kekayaannya kepada otoritas yang berwenang serta tidak mematuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak (Kompas.com). Hal ini menunjukkan bahwa kebocoran pajak masih terjadi, disebabkan oleh wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak.

Disisi lain, sektor keuangan dan perbankan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Lembaga keuangan dan perbankan menjadi penggerak utama dalam mengatur aliran dana dan kredit, yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi nasional. Dengan perannya yang sentral, penting untuk memastikan bahwa sektor ini menjalankan praktik perpajakan yang sesuai. Oleh karena itu, penting untuk memahami Berbagai faktor memengaruhi tax avoidance di sektor ini. Salah satu langkah yang diambil untuk mengurangi tax avoidance adalah dengan membentuk sistem yang memiliki peran penting dalam memantau kinerja perusahaan terkait perpajakan, yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan dapat menjadi seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemerintah, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya,

mencakup hak dan kewajiban mereka, serta bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Mita Dewi, 2019).

Aspek tata kelola perusahaan yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak meliputi penyelarasan insentif, struktur dewan, dan dorongan dari para pemangku kepentingan, yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berperan dalam membatasi risiko *tax avoidance* (Kovermann & Velte, 2019). Komisaris independen, misalnya, diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance* (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021), yang menunjukkan diperkuat bahwa keberadaan komisaris independen dalam struktur perusahaan dapat membantu mengawasi manajemen dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih hati-hati, sehingga mengurangi praktik *tax avoidance*. Namun, penelitian mengenai peran komisaris independen dalam *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan pengaruh negatif komisaris independen terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Meskipun peran komisaris independen diharapkan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait *tax avoidance*, Taebenu & Valentine Siagian (2023), berpendapat bahwa meskipun komisaris independen memiliki peran dalam pengawasan dan pengendalian kinerja manajemen, proporsi komisaris independen yang ada dalam dewan komisaris tidak cukup untuk mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menghindari pajak. Bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang memperlihatkan pentingnya peran dewan dalam meningkatkan kualitas pengawasan manajemen perusahaan, sebab anggota yang tidak terafiliasi dengan manajemen, mampu memberikan perspektif objektif serta mendorong keputusan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya memengaruhi strategi pajak perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris independen, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif (Mita Dewi, 2019).

Selain itu, *tax avoidance* sering dipahami secara berbeda oleh berbagai pihak. Meskipun ada kesepakatan umum bahwa perusahaan seharusnya tidak

terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif, realitasnya menunjukkan bahwa perusahaan masih memanfaatkan celah dalam regulasi pajak untuk meminimalisir beban pajak (Oats & Tuck, 2019). Dalam penelitian Khan *et al.* (2017), peningkatan kepemilikan institusional berhubungan dengan peningkatan *tax avoidance*, di mana perusahaan berusaha mencari cela yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak. Kepemilikan institusional adalah salah satu dari sekian banyak elemen yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan mengurangi tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Pemilik institusional cenderung lebih fokus pada keputusan yang meningkatkan keuntungan pemegang saham, meskipun ini tidak selalu mendukung *tax avoidance* (Daniel *et al.*, 2022). Dalam penelitian Pramesti *et al.* (2022), kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, sebab ditemukan bahwa tingginya proporsi kepemilikan institusional dapat memperketat pengawasan yang dilakukan investor institusional terhadap manajemen perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, kemungkinan manajemen untuk mengambil risiko yang merugikan perusahaan melalui *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Oleh sebab itu, perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional yang besar lebih cenderung membatasi perilaku *tax avoidance* demi menjaga reputasi perusahaan.

Selain komisaris independen dan kepemilikan institusional, terdapat faktor lain yang dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk menghindari beban pajak, yaitu kompensasi rugi fiskal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan kerugian dari tahun-tahun sebelumnya melalui kompensasi rugi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), perusahaan yang mengalami kerugian dapat mengompensasikan kerugian, dengan batas waktu maksimal selama lima tahun. Apabila kerugian tersebut belum dapat ditutupi dalam periode tersebut, maka kerugian tidak dapat dikompensasikan lagi di tahun-tahun berikutnya, dan perusahaan harus memenuhi kewajiban perpajakannya secara normal. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPh, yang menyatakan

bahwa kerugian yang dialami dalam suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan pendapatan yang diperoleh pada tahun pajak berikutnya.

Dengan adanya kerugian, perusahaan tidak akan dikenakan pajak, sehingga laba kena pajak yang dihasilkan di periode berikutnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian, dengan demikian manajemen perusahaan dapat menggunakan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi *tax avoidance* (Daniel *et al.*, 2022). Berbanding terbalik dengan pendapat Taebenu & Valentine Siagian (2023), bahwa kebijakan kompensasi kerugian fiskal dapat mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, tanpa berupaya melakukan kecurangan pajak. Pandemi *Covid-19* memunculkan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan pajak baru serta kebijakan insentif pajak yang diberlakukan selama masa pandemi. Selain itu, penurunan pendapatan di berbagai unit bisnis perusahaan akibat dampak pandemi memberikan alasan yang mendasari manajemen melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2023. Pemilihan sektor keuangan dan perbankan menjadi pertimbangan sebagai objek penelitian dalam studi ini didasarkan pada peran strategis sektor tersebut dalam perekonomian, serta tingginya kompleksitas regulasi dan kepatuhan perpajakan yang harus dipenuhi. Perusahaan di sektor ini memiliki tingkat pengawasan yang ketat dari otoritas keuangan, baik dalam hal tata kelola perusahaan maupun transparansi keuangan. Selain itu, sektor keuangan dan perbankan di Indonesia, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) biasanya memiliki struktur kepemilikan yang lebih bervariasi dan pengelolaan risiko yang tinggi, sehingga berpotensi menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi beban pajak, termasuk *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian yang dilakukan dari tahun 2019-2023 dan memiliki perbedaan hasil penelitian yang menjadi alat ukur dari variabel independen. Penelitian ini menggunakan perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris untuk mengukur rasio komisaris independen (KD), dengan membandingkan total saham yang dimiliki oleh institusi dan total saham yang

beredar untuk memperoleh rasio kepemilikan institusional (KI) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk melihat rasio *tax avoidance* pada variabel dependen. Penelitian ini memfokuskan perusahaan sektor keuangan dan perbankan karena sektor ini memiliki struktur kepemilikan yang lebih beragam dan manajemen risiko yang tinggi, sehingga berpotensi melakukan berbagai strategi untuk mengurangi beban pajak, termasuk *tax avoidance*.

Penelitian terhadap variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, dengan hasil akhir penelitian yang berbeda-beda. Dengan adanya hal tersebut, tidak menutup kemungkinan jika penelitian-penelitian lain mengenai *tax avoidance* masih perlu untuk dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berjudul : **“Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sub Sektor Keuangan dan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang peneliti uraikan pada latar belakang sebelumnya, pokok permasalahan yang terdapat pada penelitian ini antara lain :

1. Apakah pengaruh komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
2. Apakah pengaruh kepemilikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah pengaruh kebijakan kompensasi rugi fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023
2. Untuk membuktikan bahwa kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023
3. Untuk membuktikan bahwa Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Menyamakan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, di antaranya :

1. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dengan menambah literatur baru sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait variabel yang berpengaruh terhadap tax avoidance di sektor keuangan dan perbankan.

2. Manfaat Bagi Calon Investor

Penelitian ini bermanfaat yang bagi para calon investor, sebagai salah satu informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada perusahaan sub sektor keuangan dan perbankan di Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini bertujuan untuk memberikan ruang lingkup terkait aspek yang berhubungan dengan pokok bahasan, sehingga penelitian ini tidak keluar jalur dari pokok permasalahan. Untuk menghindari hal tersebut, peneliti membuat beberapa batasan, sebagai berikut :

1. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax avoidance* dengan mengukur rasio menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

2. Variabel Independen yang diteliti antaranya adalah komisaris independen yang diukur dengan membandingkan antara jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris untuk mengukur rasio komisaris independen (KD), membandingkan antar banyaknya saham yang dimiliki institusi dengan total saham yang beredar untuk mengukur rasio kepemilikan institusional (KI), dan menggunakan variabel *dummy* “0” untuk mengukur perusahaan yang tidak menggunakan kompensasi rugi fiskal, sedangkan variabel *dummy* “1” mengukur perusahaan yang menggunakan kompensasi rugi fiskal (KRF)
3. Penelitian ini meneliti perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, untuk mempermudah membaca dan memahami isi pembahasan secara menyeluruh, serta agar isi pembahasan tetap fokus pada pokok pembahasan, maka peneliti membentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I LATAR BELAKANG

Dalam bab ini, peneliti menyusun beberapa sub-bagian pembahasan, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, peneliti menerangkan pokok pembahasan penelitian, dan kajian penelitian terdahulu berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk membentuk hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti memaparkan alur penelitian yang dapat dilakukan, antara lain adalah jenis peneltian, definisi dan operasional variabel, populasi, sampel, teknik mengumpulkan data, serta teknik olah data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan metode yang telah ditentukan sebelumnya dan menyajikan hasil tersebut dalam pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, peneliti membuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Supriyono (2018), teori keagenan (*agency theory*) adalah sebuah hubungan kontraktual yang terjadi antara agen dan prinsipal. Prinsipal mengharapkan agen untuk menjalankan perusahaan demi memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, sering terjadi konflik kepentingan karena agen memiliki kecenderungan untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti mendapatkan bonus atau insentif, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang prinsipal. Menurut Drake *et al.* (2020), mekanisme tata kelola perusahaan, seperti penyelepasan insentif antara manajemen dan pemegang saham, komposisi dewan, serta independensi dewan, berperan penting dalam mengurangi tingkat penghindaran pajak. Dalam konteks ini, komisaris independen dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh penting sebagai pengawas yang bertugas memastikan bahwa keputusan manajemen tetap selaras dengan kepentingan para pemegang saham.

Komisaris independen tidak memiliki afiliasi langsung dengan manajemen, sehingga dapat bertindak lebih objektif dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk dalam hal strategi perpajakan perusahaan. Pengawasan yang lebih efektif dari komisaris independen memastikan bahwa kebijakan perusahaan, khususnya terkait perpajakan, lebih transparan, etis, dan sesuai dengan peraturan. Menurut Wang *et al.* (2020), interaksi antara komposisi dewan yang independen dan struktur kepemilikan yang terpusat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, mengurangi risiko penghindaran pajak yang berlebihan. Dengan demikian, kehadiran komisaris independen yang kuat cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak, karena mereka dapat membatasi perilaku manajemen yang terlalu agresif dalam menurunkan beban pajak, yang dapat merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Selain itu, Kovermann & Velte (2019) menambahkan bahwa dewan yang lebih

independen memiliki kecenderungan untuk menantang strategi pajak yang terlalu agresif, sehingga menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mengurangi konflik keagenan dengan bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang signifikan. Institusi keuangan besar yang memiliki kepemilikan substansial dalam perusahaan memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen beroperasi sesuai dengan kepentingan pemegang saham, tidak hanya demi keuntungan jangka pendek tetapi juga demi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Seperti yang dijelaskan oleh Daniel *et al.* (2022) pada penelitiannya, bahwa kepemilikan institusional dapat berpotensi meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, pemilik institusional lebih fokus pada keputusan manajerial yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, yang tidak selalu sejalan dengan *tax avoidance*. Dalam penelitiannya, Tang (2019) menunjukkan bahwa di negara-negara dengan mekanisme tata kelola yang kuat, praktik penghindaran pajak cenderung dihargai lebih tinggi oleh investor, karena mereka percaya bahwa manfaat pajak akan dikembalikan kepada pemegang saham dan tidak disalahgunakan oleh manajemen. Ini sejalan dengan fungsi komisaris independen dan kepemilikan institusional dalam menjaga transparansi dan tata kelola perusahaan yang efektif, sehingga terjalin sinergi antara pengawasan dewan dan kekuatan pemilik institusional untuk mengurangi perilaku manajemen yang mementingkan kepentingan pribadi.

2.1.2 *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance merupakan perilaku yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan pajak demi meminimalkan beban pajak yang diwajibkan (Pohan, 2013). Menurut penelitian Khan *et al.* (2017), *tax avoidance* menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui cara-cara legal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan margin keuntungan dan meningkatkan peluang memenuhi atau melampaui ekspektasi analis. Meskipun dikatakan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak, menurut Taebenu & Valentine Siagian (2023), penghindaran pajak ini berbeda dari penggelapan pajak

karena masih dilakukan dalam batas hukum, tetapi secara moral sering diperdebatkan karena mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara. Meskipun demikian *Tax avoidance* melalui strategi agresif yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, seperti denda dan reputasi buruk di mata publik (Mita Dewi, 2019)

2.1.3 Komisaris Independen

Dewan komisaris bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) disesuaikan dengan kompleksitas pada perusahaan, sehingga perusahaan wajib memiliki paling sedikitnya 2 anggota dewan komisaris, hal ini disampaikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pada Pasal 108 ayat 5. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dewan komisaris yang terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Komisaris independen bertugas untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Komisaris independen diharapkan menjadi pengawas yang netral dan mampu menahan manajemen dari praktik-praktik yang tidak etis, termasuk penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021).

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertindak memberikan pengawasan terhadap anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada direksi (Suaidah, 2020). Komisaris independen tidak diperkenankan memiliki hubungan pribadi dengan pemegang saham mayoritas ataupun anggota direksi lain. Komisaris independen berperan untuk memastikan bahwa manajer menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku tanpa melanggar peraturan yang telah ditetapkan Oktavia *et al.* (2020). Dengan demikian semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan, hal tersebut dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan yang lebih ketat ini membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya membantu mengurangi peluang terjadinya praktik *tax avoidance* Pratomo & Risa Aulia Rana (2021).

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional terdiri atas kepemilikan saham dengan proporsi tinggi yang dimiliki oleh institusi dan pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Dewi, *et al.* (2020), kepemilikan institusional penting untuk memonitor manajemen karena mendorong pengawasan yang lebih optimal. Investor institusional, dengan investasi besar mereka di pasar modal, berperan sebagai pengawas untuk menjamin kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terdistribusi secara luas cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang rendah, sebab pemegang saham yang lebih banyak aktif dalam mengawasi manajemen (Wang *et al.*, 2020). Dengan pengawasan yang ketat, manajemen cenderung tidak akan mengambil risiko yang dapat merugikan dan menghindari *tax avoidance*. Semakin tinggi porsi kepemilikan institusional, semakin meningkat pengawasan yang diberikan oleh investor institusional terhadap manajemen perusahaan (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021).

Berdasarkan penelitian - penelitian sebelumnya, pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik *tax avoidance* memiliki hasil positif dan negatif. Dalam penelitian Ardiyanto & Marfiana (2021), kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti institusi yang memiliki saham perusahaan cenderung menghindari *tax avoidance* untuk menjaga reputasi perusahaan. Namun dalam penelitian Khan *et al.* (2017), peningkatan kepemilikan institusional berhubungan dengan peningkatan praktik *tax avoidance*, di mana perusahaan memanfaatkan celah-celah pajak untuk mengurangi kewajiban pajak.

2.1.5 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal adalah proses ganti rugi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengimbangi kerugian yang dialami dalam satu tahun pajak dengan laba yang diperoleh di tahun-tahun pajak berikutnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan kerugian dari tahun-tahun sebelumnya melalui kompensasi rugi fiskal. Apabila kerugian tersebut belum dapat ditutupi dalam

periode tersebut, maka kerugian tidak dapat dikompensasikan lagi di tahun-tahun berikutnya, dan perusahaan harus memenuhi kewajiban perpajakannya secara normal. Dengan adanya kompensasi ini, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang diterima dengan mengurangi laba ditahun perusahaan tersebut mengalami kerugian. Aturan mengenai kompensasi rugi fiskal diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjelaskan bahwa kerugian dapat dikompensasikan dengan pendapatan selama maksimal lima tahun berturut-turut setelah kerugian tersebut terjadi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun dari hasil penelitian yang didapat, masih banyak perbedaan antara salah satu peneliti dengan peneliti lainnya, sehingga peneliti tertarik untuk mengulang kembali penelitian tersebut.

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kovermann, J., & Velte, P. (2019). <i>The impact of corporate governance on corporate tax avoidance - A literature review</i> . <i>Journal of International Accounting, Auditing and Taxation</i> , 36, 100270.	Variabel Independen : <i>Board composition, ownership structure, capital market pressure, enforcement and government relations, pressure from other stakeholders</i> Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i>	Komposisi Dewan independen dan beragam dapat berkontribusi pada penghindaran pajak yang lebih terukur dan bertanggung jawab. Struktur kepemilikan yang berbeda mempengaruhi keputusan penghindaran pajak, dengan kepemilikan institusional sering kali mendorong penghindaran pajak yang lebih agresif.

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). <i>Corporate governance, incentives, and tax avoidance</i> . <i>Journal of accounting and Economics</i> , 60(1), 1-17.	Variabel Independen : <i>Corporate Governance, Incentives</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Tidak ditemukan hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak pada mean kondisional dan median distribusi penghindaran pajak. Namun, dengan regresi kuantil, ditemukan hubungan positif antara independensi dewan terhadap rendahnya tingkat penghindaran pajak.
3	Tang, T. Y. (2019). <i>The value implications of tax avoidance across countries</i> . <i>Journal of Accounting, Auditing & Finance</i> , 34(4), 615-638.	Variabel Independen : <i>Tax Avoidance, WLI (Weak Legal Institutions)</i> <i>LASD (Legal Anti-Self-Dealing)</i> , <i>LCPI (Legal Corruption Perception Index)</i> , dan <i>LCGI (Legal Corporate Governance Index)</i> Variabel Dependen : TQ (Tobin's Q) nilai perusahaan	<i>Tax avoidance</i> secara umum memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan, yang mendukung pandangan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, efek ini bervariasi tergantung pada kekuatan institusi hukum di masing-masing negara.
4	Drake, K. D., Hamilton, R., & Lusch, S. J. (2020). <i>Are declining effective tax rates indicative of tax avoidance? Insight from effective tax rate reconciliations</i> . <i>Journal of Accounting and Economics</i> , 70(1), 101317.	Variabel Independen : <i>valuation allowances (VA)</i> terkait dengan kerugian pada periode sebelumnya Variabel Dependen : <i>Tax avoidance (effective tax rates (ETRs))</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penurunan dalam GAAP ETRs disebabkan oleh <i>valuation allowances (VA)</i> yang terkait dengan kerugian masa lalu, bukan karena penghindaran pajak yang disengaja.

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Oats, L., & Tuck, P. (2019). <i>Corporate tax avoidance : is tax transparency the solution?.</i> <i>Accounting and Business Research</i> , 49(5), 565-583.	Variabel Independen : <i>Tax transparency</i> Variabel Dependen : <i>Corporate tax avoidance</i>	Penelitian mengungkapkan bahwa inisiatif transparansi, seperti pelaporan pajak berdasarkan negara dan publikasi strategi pajak, dapat menyebabkan peningkatan biaya kepatuhan dan potensi sengketa antara perusahaan dan otoritas pajak.
6	Daniel, M., Ridwansyah, E., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. <i>Jurnal Ilmiah ESAI</i> , 16(2), 130-141	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kompensasi Rugi Fiskal Variabel Dependen : Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019	Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh keahlian keuangan, kompensasi direksi, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan institusi pada penghindaran pajak perusahaan. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, 7(1), 31-47.	Variabel Independen : Keahlian keuangan, kompensasi direksi, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan institusi Variabel Dependen : Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.	Hasil penelitian menemukan bahwa kompensasi direksi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan keahlian keuangan direksi dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
8	Ahmad, E. F. (2020). Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, 1(1), 12-27.	Variabel Independen : <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Variabel Dependen : Penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017	<i>Return on Asset (ROA)</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kompenasi rugi fiskal berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan, <i>return on asset</i> , <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kompenasi rugi fiskal, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9	Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh <i>leverage</i> , intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen, 3(1), 551-566.	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Intensitas Modal dan Kompensasi Rugi Fiskal Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur subsektor industri dasar dan kimia.	<i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa aset tetap yang besar yang dimiliki perusahaan dapat menimbulkan beban penyusutan yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun perusahaan dengan kompensasi rugi fiskal juga dapat melakukan penghindaran pajak.
10	Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Sikap, 4(2), 160-172.	Variabel Independen : Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset Variabel Dependen : Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kompensasi rugi fiskal secara parsial memiliki pengaruh negatif dan variabel pertumbuhan aset secara parsial memiliki pengaruh positif. Sementara, secara simultan tiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
11	Isnanto, H. D., Majidah, M., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak (studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). <i>eProceedings of Management</i> , 6(2).	Variabel Independen : Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal, intensitas persediaan, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan. Secara parsial, intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
12	Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). <i>Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. The Accounting Review</i> , 92(2), 101-122.	Variabel Independen : <i>Institutional ownership and corporate</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menemukan peningkatan penghindaran pajak yang melibatkan penggunaan perlindungan pajak, dan manfaat langsungnya mencakup margin keuntungan yang lebih tinggi dan kemungkinan memenuhi atau mengalahkan ekspektasi analis. Secara kolektif, hasil penelitian ini menjelaskan pengaruh peningkatan konsentrasi kepemilikan terhadap penghindaran pajak.

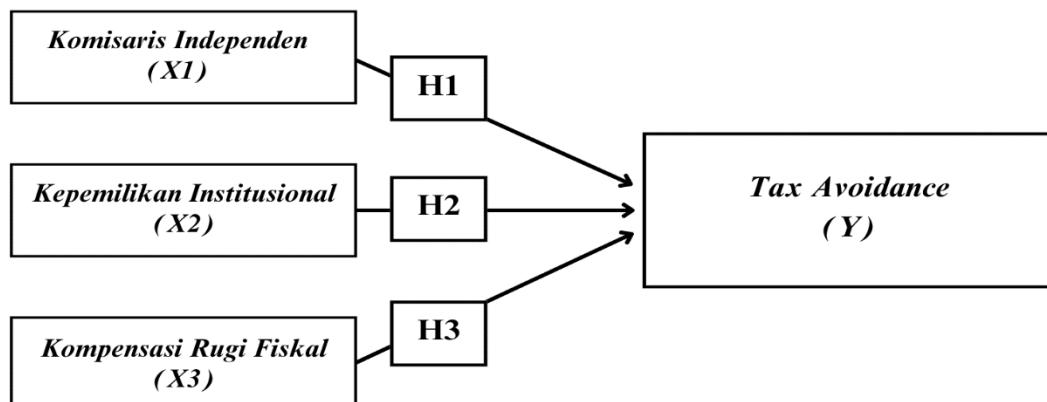
13	<p>Taebenu, T. A., & Siagian, V. (2023). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bei Tahun (2017-2021). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 9(2), 296-302.</p>	<p>Variabel Independen : Komisaris Independen Dan Kompensasi Rugi Fiskal Variabel Dependen : Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bei Tahun (2017-2021)</p>	<p>Hasil penelitian tersebut adalah ini adalah kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021, sementara komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
14	<p>Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). <i>Corporate tax avoidance: A literature review and research agenda. Journal of Economic Surveys</i>, 34(4), 793-811.</p>	<p>Variabel Independen : Faktor Eksternal (penegakan pajak), dan karakteristik Perusahaan (ukuran perusahaan, strategi bisnis, dan struktur kepemilikan) Variabel Dependen : Tax Avoidance</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik karakteristik internal perusahaan, seperti ukuran perusahaan dan strategi bisnis, maupun faktor eksternal, seperti penegakan pajak, memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Di sisi lain, penegakan pajak yang lebih ketat dapat mengurangi penghindaran pajak, menunjukkan bahwa lingkungan institusional memainkan peran penting dalam perilaku perpajakan perusahaan</p>

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
15	Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 91-103.	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Variabel Dependen : Penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran kepemilikan institusional dan komisaris independen dalam meminimalisir praktik penghindaran pajak di perusahaan barang konsumsi di BEI.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Dalam kerangka pemikiran ini, hipotesis yang diajukan mencakup bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* (H_1), kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H_2), dan kompensasi rugi fiskal berdampak pada *tax avoidance* (H_3). Diagram di atas menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut dan tingkat *tax avoidance* pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Dari landasan teori atau kajian pustaka yang telah disusun oleh peneliti, dan beberapa sumber penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini menetapkan beberapa hipotesis sebagai berikut,

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Peran komisaris independen dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menekan tindakan manajemen yang berorientasi pada kepentingan pribadi, termasuk *tax avoidance* (penghindaran pajak). Komisaris independen yang tidak berafiliasi dengan manajemen diharapkan dapat bertindak lebih objektif dan berani menentang keputusan manajerial yang berpeluang melakukan penghindaran pajak (Utami, 2023).

Penelitian oleh Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) mengungkapkan bahwa keberadaan komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan

dapat berperan dalam mengawasi manajemen dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijaksana, sehingga dapat mengurangi *tax avoidance*. Dalam penelitian tersebut, juga ditemukan bahwa komisaris independen bernilai negatif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen saja tidak cukup untuk menghentikan praktik penghindaran pajak.

Teori keagenan mendukung temuan ini, yang menjelaskan bahwa komisaris independen berfungsi sebagai pengawas untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dengan adanya pengawasan yang lebih baik dari komisaris independen, perusahaan diharapkan dapat menerapkan kebijakan pajak yang lebih transparan dan etis, yang pada gilirannya mengurangi *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti berasumsi jika semakin tinggi jumlah komisaris independen, semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

H₁ : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Tax avoidance dapat dihindari melalui keberadaan kepemilikan institusional yang mempunyai peran mengawasi manajemen perusahaan dan mengurangi manajemen yang mengambil kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Investor institusional, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, memiliki kepentingan jangka panjang dalam perusahaan dan berfokus pada pengembalian investasi yang stabil. Sejalan dengan teori agensi, kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pengawas yang bertugas memastikan bahwa keputusan manajemen tetap selaras dengan kepentingan para pemegang saham. Dengan pengawasan yang lebih ketat, manajemen cenderung tidak mengambil risiko yang dapat merugikan, seperti melakukan *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian Wang *et al.* (2020) mendukung mendukung hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar luas cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, karena

pemegang saham yang lebih banyak akan lebih aktif dalam mengawasi tindakan manajerial.

Dalam penelitian Pratomo & Risa Aulia Rana (2021), komisaris independen terbukti bernilai negatif terhadap *tax avoidance*. Keberadaan pemegang saham institusional secara aktif dapat mendorong perusahaan untuk berhati-hati mengambil keputusan pajak, demi menghindari potensi reaksi negatif dari para pemangku kepentingan (Drake *et al.*, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti *et al.* (2022) mendukung penelitian ini dengan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tingginya proporsi kepemilikan institusional, mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional terhadap manajemen perusahaan (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Oleh karena itu, diasumsikan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

2.4.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Kompensasi rugi fiskal merupakan kebijakan yang memungkinkan perusahaan mengimbangi kerugian pajak satu tahun dengan laba di tahun-tahun berikutnya, sehingga mengurangi kewajiban pajak. Jika kerugian tidak tertutupi dalam periode ini, kewajiban pajak harus dipenuhi secara normal tanpa kompensasi. Menurut Daniel *et al.* (2022), dengan adanya kerugian, perusahaan tidak akan dikenakan pajak, sehingga laba kena pajak yang dihasilkan di periode berikutnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian, dengan demikian kompensasi rugi fiskal dapat digunakan manajemen perusahaan sebagai strategi *tax avoidance*. Dibuktikan oleh penelitian Mulyana *et al.* (2020) yang menyimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki nilai negatif terhadap *tax avoidance*, yang artinya saat perusahaan menggunakan kompensasi rugi fiskal, tindakan penghindaran pajak cenderung berkurang. Kondisi ini mengindikasikan kompensasi rugi fiskal mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Saat perusahaan mengalami kerugian fiskal, mereka dapat dibebaskan dari kewajiban perpajakan hingga lima tahun, selama kerugian

tersebut belum ditutupi. Laba yang diperoleh pada tahun-tahun berikutnya digunakan untuk menutupi kerugian sebelumnya, sehingga adanya kompensasi rugi fiskal dalam laporan keuangan perusahaan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menyajikan laporan secara wajar tanpa melakukan tindakan manipulasi, termasuk *tax avoidance*.

Hasil penelitian Mulyana *et al.* (2020) didukung oleh penelitian Rinaldi *et al.* (2023) yang menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, sebab dapat mengurangi beban pajak perusahaan, dan peneliti berpendapat bahwa kompensasi rugi fiskal tidak selalu mendorong penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan cenderung memanfaatkan kompensasi tersebut secara legal tanpa terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa semakin tinggi penggunaan kompensasi rugi fiskal, semakin rendah potensi perusahaan untuk terlibat dalam *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan peneliti, yaitu :

H₃ : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu kerangka yang disusun oleh peneliti sebagai alat bantu dalam menentukan metode pengumpulan data, menganalisis data dan tujuan penelitian. Desain penelitian membantu peneliti memastikan agar penelitian berjalan sistematis sesuai prosedur. Berdasarkan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif ialah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme yang dapat digunakan dalam penelitian dengan populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2019). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pada seluruh perusahaan sub sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2023 dengan cara mengunduh data tersebut dari website resmi masing-masing perusahaan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel ialah metode yang dipakai peneliti untuk menentukan bagaimana suatu variabel dapat diukur dan diamati. Variabel penelitian merujuk pada atribut, karakteristik, atau nilai yang dimiliki oleh orang, objek, organisasi, atau kegiatan, yang memiliki variasi tertentu dan diterapkan peneliti untuk dianalisis dan disimpulkan (Sugiyono, 2019). Operasional variabel membantu peneliti memahami setiap variabel yang terlibat dalam penelitian, baik variabel independen maupun dependen. Berikut ini penjelasan terkait operasional dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu disebutkan variabel independen yang terdiri dari Komisaris Independen (KD), Kepemilikan Institusional (KI), dan Kompensasi Rugi Fiskal (KRF) serta *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tabel Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Skala
Komisaris Independen (X ₁)	Dewan komisaris independen merupakan organisasi perseorangan yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi (Suaidah, 2020)	$\frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
Kepemilikan Institusional (X ₂)	Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga dari total saham yang beredar (Suaidah, 2020).	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Institusional}}{\text{Saham yang Beredar}} \times 100\%$	Rasio
Kompensasi Rugi Fiskal (X ₃)	Kompensasi rugi fiskal adalah proses ganti rugi dalam satu tahun pajak ke tahun berikutnya secara berturut-turut maksimal 5 tahun (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009).	Variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun <i>t</i>	Nominal
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>Tax Avoidance</i> merupakan salah satu strategi dalam mengurangi pajaknya dengan memanfaatkan celah pajak (Pohan, 2013)	$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2019), populasi terdiri dari semua subjek dan objek yang memiliki karakteristik serta kualitas yang ditentapkan oleh peneliti sebagai landasan untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dalam penelitian. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2023.

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia hingga akhir tahun 2023, terdapat 105 perusahaan sub sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar, yaitu antara lain adalah :

Tabel 3. 2 Daftar Populasi Nama Perusahaan Sektor Keuangan dan Perbankan

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	IPO	Sector Industry
1	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	06/07/1989	<i>Insurance</i>
2	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	31/03/2004	<i>Financing Service</i>
3	AGRO	Bank Raya Indonesia Tbk.	08/08/2003	<i>Banks</i>
4	AGRS	Bank IBK Indonesia Tbk.	22/12/2014	<i>Banks</i>
5	AHAP	Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.	14/09/1990	<i>Insurance</i>
6	AMAG	Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	23/12/2005	<i>Insurance</i>
7	AMAR	Bank Amar Indonesia Tbk.	09/01/2020	<i>Banks</i>
8	AMOR	Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.	14/01/2020	<i>Investment Service</i>
9	APIC	Pacific Strategic Financial Tbk.	18/12/2002	<i>Holding & Investment</i>
10	ARTO	Bank Jago Tbk.	12/01/2016	<i>Banks</i>
11	ASBI	Asuransi Bintang Tbk.	29/11/2016	<i>Insurance</i>
12	ASDM	Asuransi Dayin Mitra Tbk.	15/12/1989	<i>Insurance</i>
13	ASJT	Asuransi Jasa Tania Tbk.	23/12/2003	<i>Insurance</i>
14	ASMI	Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.	16/01/2014	<i>Insurance</i>
15	ASRM	Asuransi Ramayana Tbk.	19/03/1990	<i>Insurance</i>
16	BABP	Bank MNC Internasional Tbk.	15/07/2002	<i>Banks</i>
17	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk.	04/10/2007	<i>Banks</i>
18	BANK	Bank Aladin Syariah Tbk.	01/02/2021	<i>Banks</i>
19	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	31/05/2000	<i>Banks</i>
20	BBHI	Allo Bank Indonesia Tbk.	12/08/2015	<i>Banks</i>
21	BBKP	Bank KB Bukopin Tbk.	10/07/2006	<i>Banks</i>

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	IPO	Sector Industry
22	BBLD	Buana Finance Tbk.	07/05/1990	<i>Financing Service</i>
23	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk.	08/07/2013	<i>Banks</i>
24	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	25/11/1996	<i>Banks</i>
25	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	10/11/2003	<i>Banks</i>
26	BBSI	Krom Bank Indonesia Tbk.	07/09/2020	<i>Banks</i>
27	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	17/12/2009	<i>Banks</i>
28	BBYB	Bank Neo Commerce Tbk.	13/01/2015	<i>Banks</i>
29	BCAP	MNC Kapital Indonesia Tbk.	08/06/2001	<i>Holding & Investment</i>
30	BCIC	Bank Jtrust Indonesia Tbk.	25/06/1997	<i>Banks</i>
31	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	06/12/1989	<i>Banks</i>
32	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.	13/07/2001	<i>Banks</i>
33	BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk.	16/05/1990	<i>Financing Service</i>
34	BGTG	Bank Ganesha Tbk.	12/05/2016	<i>Banks</i>
35	BHAT	Bhakti Multi Artha Tbk.	15/04/2020	<i>Insurance</i>
36	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.	16/01/2014	<i>Banks</i>
37	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	08/07/2010	<i>Banks</i>
38	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	12/07/2012	<i>Banks</i>
39	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk.	21/11/2002	<i>Banks</i>
40	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk.	11/07/2013	<i>Banks</i>
41	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	14/07/2003	<i>Banks</i>
42	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.	01/06/2006	<i>Banks</i>
43	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	29/11/1989	<i>Banks</i>
44	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.	21/11/1989	<i>Banks</i>
45	BNLI	Bank Permata Tbk.	15/01/1990	<i>Banks</i>
46	BPFI	Woori Finance Indonesia Tbk.	01/06/2009	<i>Financing Service</i>
47	BPII	Batavia Prosperindo Internasional Tbk.	08/07/2014	<i>Holding & Investment</i>
48	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.	09/05/2018	<i>Banks</i>
49	BSIM	Bank Sinarmas Tbk.	13/12/2010	<i>Banks</i>
50	BSWD	Bank of India Indonesia Tbk.	01/05/2002	<i>Banks</i>
51	BTPN	Bank BTPN Tbk.	12/03/2008	<i>Banks</i>
52	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.	08/05/2018	<i>Banks</i>
53	BVIC	Bank Victoria International Tbk.	30/06/1999	<i>Banks</i>

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	IPO	Sector Industry
54	CASA	Capital Financial Indonesia Tbk.	19/07/2016	Holding & Investment
55	CFIN	Clipan Finance Indonesia Tbk.	27/08/1990	Financing Service
56	DEFI	Danasupra Erapacific Tbk.	06/07/2001	Financing Service
57	DNAR	Bank Oke Indonesia Tbk.	11/07/2014	Banks
58	DNET	Indoritel Makmur Internasional Tbk.	11/12/2020	Holding & Investment
59	FUJI	Fuji Finance Indonesia Tbk.	09/07/2019	Financing Service
60	GSMF	Equity Development Investment Tbk.	23/10/1989	Holding & Investment
61	HDFA	Radana Bhaskara Finance Tbk.	10/05/2011	Financing Service
62	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk.	23/08/1990	Banks
63	JMAS	Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.	18/12/2017	Insurance
64	LIFE	Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.	09/07/2019	Insurance
65	LPGI	Lippo General Insurance Tbk.	22/07/1997	Insurance
66	LPPS	Lenox Pasifik Investama Tbk.	28/03/1994	Holding & Investment
67	MASB	Bank Multiarta Sentosa Tbk.	30/06/2021	Banks
68	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk.	29/08/1997	Banks
69	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	03/07/2007	Banks
70	MEGA	Bank Mega Tbk.	17/04/2000	Banks
71	MFIN	Mandala Multifinance Tbk.	06/09/2005	Financing Service
72	MGNA	Magna Investama Mandiri Tbk.	08/07/2014	Holding & Investment
73	MREI	Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.	04/09/1989	Insurance
74	MTWI	Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	12/10/2017	Insurance
75	NICK	Charnic Capital Tbk.	02/05/2018	Holding & Investment
76	NISP	Bank OCBC NISP Tbk.	20/10/1994	Banks
77	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk.	20/05/2013	Banks
78	OCAP	Onix Capital Tbk.	10/10/2003	Holding & Investment

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	IPO	Sector Industry
79	PADI	Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.	09/01/2012	<i>Investment Service</i>
80	PALM	Provident Investasi Bersama Tbk.	08/10/2012	<i>Holding & Investment</i>
81	PANS	Panin Sekuritas Tbk.	31/05/2000	<i>Investment Service</i>
82	PEGE	Panca Global Kapital Tbk.	24/06/2005	<i>Holding & Investment</i>
83	PLAS	Polaris Investama Tbk.	16/03/2001	<i>Holding & Investment</i>
84	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk.	29/12/1982	<i>Banks</i>
85	PNBS	Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	15/01/2014	<i>Banks</i>
86	PNIN	Paninvest Tbk.	20/09/1983	<i>Insurance</i>
87	PNLF	Panin Financial Tbk.	14/06/1983	<i>Insurance</i>
88	POLA	Pool Advista Finance Tbk.	16/11/2018	<i>Financing Service</i>
89	POOL	Pool Advista Indonesia Tbk.	20/05/1991	<i>Holding & Investment</i>
90	RELI	Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.	13/07/2005	<i>Investment Service</i>
91	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	15/12/2006	<i>Banks</i>
92	SFAN	Surya Fajar Capital Tbk.	19/06/2019	<i>Holding & Investment</i>
93	SMMA	Sinarmas Multiartha Tbk.	05/07/1995	<i>Holding & Investment</i>
94	SRTG	Saratoga Investama Sedaya Tbk.	26/06/2013	<i>Holding & Investment</i>
95	STAR	Buana Artha Anugerah Tbk.	13/07/2011	<i>Holding & Investment</i>
96	TIFA	KDB Tifa Finance Tbk	08/07/2011	<i>Financing Service</i>
97	TRIM	Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	31/01/2000	<i>Investment Service</i>
98	TRUS	Trust Finance Indonesia Tbk.	28/11/2002	<i>Financing Service</i>
99	TUGU	Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	28/05/2018	<i>Insurance</i>
100	VICO	Victoria Investama Tbk.	08/07/2013	<i>Holding & Investment</i>
101	VINS	Victoria Insurance Tbk.	28/09/2015	<i>Insurance</i>
102	VRNA	Mizuho Leasing Indonesia Tbk.	25/06/2008	<i>Financing Service</i>
103	VTNY	Venteny Fortuna International Tbk.	15/12/2022	<i>Financing Service</i>

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	IPO	Sector Industry
104	WOMF	Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.	13/12/2004	Financing Service
105	YULE	Yulie Sekuritas Indonesia Tbk.	10/12/2004	Investment Service

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang mewakili populasi tersebut (Sugiono, 2016). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti secara objektif, dengan demikian peneliti dapat menemukan populasi sebagai sampel dengan karakteristik yang sudah ditentukan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Kriteria pemilihan sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi : Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI hingga tahun 2023	105
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (purposive sampling) :	
1. Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut periode 2019-2023	(6)
2. Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan periode 2019-2023	(9)
3. Perusahaan yang mengalami rugi selama periode 2019-2023	(34)
4. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data penelitian	(6)
Sampel Penelitian	50
Total Sampel (n x periode penelitian) = (sampel penelitian x 5 th)	250

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*, maka peneliti mendapatkan total sampel 250, dari sampel penelitian sebanyak 50 perusahaan sub sektor keuangan dan perbankan dengan periode penelitian 5 tahun (2019-2023), sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Daftar Sampel Nama Perusahaan Sektor Keuangan dan Perbankan

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	IPO	Sector Industry
1	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	06/07/1989	<i>Insurance</i>
2	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	31/03/2004	<i>Financing Service</i>
3	AMAG	Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	23/12/2005	<i>Insurance</i>
4	APIC	Pacific Strategic Financial Tbk.	18/12/2002	<i>Holding & Investment</i>
5	ASBI	Asuransi Bintang Tbk.	29/11/2016	<i>Insurance</i>
6	ASDM	Asuransi Dayin Mitra Tbk.	15/12/1989	<i>Insurance</i>
7	ASRM	Asuransi Ramayana Tbk.	19/03/1990	<i>Insurance</i>
8	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk.	04/10/2007	<i>Banks</i>
9	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	31/05/2000	<i>Banks</i>
10	BBLD	Buana Finance Tbk.	07/05/1990	<i>Financing Service</i>
11	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk.	08/07/2013	<i>Banks</i>
12	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	25/11/1996	<i>Banks</i>
13	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	10/11/2003	<i>Banks</i>
14	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	17/12/2009	<i>Banks</i>
15	BCAP	MNC Kapital Indonesia Tbk.	08/06/2001	<i>Holding & Investment</i>
16	BDMN	Mank Danamon Indonesia Tbk.	06/12/1989	<i>Banks</i>
17	BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk.	16/05/1990	<i>Financing Service</i>
18	BGTG	Bank Ganeshia Tbk.	12/05/2016	<i>Banks</i>
19	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.	16/01/2014	<i>Banks</i>
20	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	08/07/2010	<i>Banks</i>
21	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	12/07/2012	<i>Banks</i>
22	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk.	11/07/2013	<i>Banks</i>
23	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	14/07/2003	<i>Banks</i>
24	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.	01/06/2006	<i>Banks</i>
25	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	29/11/1989	<i>Banks</i>
26	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.	21/11/1989	<i>Banks</i>
27	BNLI	Bank Permata Tbk.	15/01/1990	<i>Banks</i>
28	BPFI	Woori Finance Indonesia Tbk.	01/06/2009	<i>Financing Service</i>
29	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.	09/05/2018	<i>Banks</i>

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	IPO	Sector Industry
30	BSIM	Bank Sinarmas Tbk.	13/12/2010	Banks
31	BTPN	Bank BTPN Tbk.	12/03/2008	Banks
32	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.	08/05/2018	Banks
33	CASA	Capital Financial Indonesia Tbk.	19/07/2016	Holding & Investment
34	CFIN	Clipan Finance Indonesia Tbk.	27/08/1990	Financing Service
35	FUJI	Fuji Finance Indonesia Tbk.	09/07/2019	Financing Service
36	LPGI	Lippo General Insurance Tbk.	22/07/1997	Insurance
37	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk.	29/08/1997	Banks
38	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	03/07/2007	Banks
39	MEGA	Bank Mega Tbk.	17/04/2000	Banks
40	MFIN	Mandala Multifinance Tbk.	06/09/2005	Financing Service
41	NISP	Bank OCBC NISP Tbk.	20/10/1994	Banks
42	PANS	Panin Sekuritas Tbk.	31/05/2000	Investment Service
43	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk.	29/12/1982	Banks
44	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	15/12/2006	Banks
45	SMMA	Sinarmas Multiartha Tbk.	05/07/1995	Holding & Investment
46	STAR	Buana Artha Anugerah Tbk.	13/07/2011	Holding & Investment
47	TIFA	KDB Tifa Finance Tbk	08/07/2011	Financing Service
48	TRIM	Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	31/01/2000	Investment Service
49	TRUS	Trust Finance Indonesia Tbk.	28/11/2002	Financing Service
50	WOMF	Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.	13/12/2004	Financing Service

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, peneliti melakukan perhitungan statistik dan pengujian sebagai berikut :

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Merunut Ghozali (2016), statistik deskriptif dapat mengambarkan data penelitian dengan memperkirakan antara nilai rata-rata, standar deviasi, varians, nilai minimum, maksimum, jumlah, rentang, kurtosis, dan skewness. Dengan menggunakan statistik deskriptif, seluruh variabel dalam penelitian dapat dijelaskan dengan lebih jelas. Statistik deskriptif memberikan ukuran-ukuran numerik yang penting dalam menghasilkan data sampel.

3.4.2 Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Regresi data panel adalah analisis yang menggabungkan antara data *cross-section* dan data *time-series*, sehingga memiliki observasi lebih banyak dibandingkan dengan data *cross-section* dan data *time-series* (Gujarati, D. N., & Porter, 2009). Penelitian ini akan menganalisis data dengan regresi menggunakan bantuan program *Eviews12*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel dengan variabel independen (Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan kompensasi rugi fiskal), dan Variabel dependen (*tax avoidance*). Persamaan regresi data panel yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 KD + \beta_2 KI + \beta_3 KRF + \epsilon$$

Keterangan:

Y	=	Tax Avoidance (CETR)
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien regresi
KD	=	Komisaris Independen
KI	=	Kepemilikan Institusional
KRF	=	Kompensasi Rugi Fiskal
ϵ	=	Error term (tahun)

Regresi data panel dapat dilakukan dengan menguji tiga model analisis yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Masing-masing model analisis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain :

3.4.2.1 Common Effect Model

Common effect model (CEM) yang juga dikenal sebagai model kuadrat terkumpul (*pooled least square model*) atau regresi terkumpul (*pooled regression*), adalah salah satu pendekatan dalam analisis regresi untuk data panel. yang menggabungkan data *time series* dan *cross-section*. Data gabungan ini dianggap sebagai suatu kesatuan pengamatan sehingga untuk mengestimasi parameter model ini dapat digunakan *ordinary least square* (OLS). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam rentan waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.

3.4.2.2 Fixed Effect Model

Fixed effect model (FEM) adalah salah satu pendekatan dalam analisis regresi untuk data panel. yang dalam proses estimasinya akan menghasilkan intersep yang bervariasi antar individu, tetapi tidak bervariasi antar waktu, sedangkan koefisien *slope* pada variabel bebas bersifat tetap baik antar waktu maupun antar individu. Perbedaan intersep pada model *fixed effect* dapat dibentuk dengan menggunakan variabel dummy. Teknik ini dinamakan *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengkombinasikan efek waktu yang bersifat sistematis. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel *dummy* waktu di dalam model.

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel yang menggunakan metode *common effect*, penggunaan data *panel common effect* tidak realistik karena akan menghasilkan *intercept* ataupun *slope* pada data panel yang tidak berubah baik antar individu (*cross-section*) maupun antar waktu (*timeseries*). Model ini juga untuk mengestimasi data panel dengan menambahkan variabel *dummy*. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu.

3.4.2.3 Random Effect Model

Random Effect Model (REM) salah satu pendekatan dalam regresi data panel yang mengasumsikan bahwa variabel residual memiliki hubungan, baik antar waktu maupun antar individu. *Model efek acak ini* dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan *fixed effect* model yang menggunakan variabel *dummy*. Asumsi terpenting dalam 50 model ini adalah tidak terdapat korelasi atau hubungan antar alat individu dengan variabel penjelas dalam model.

3.4.3 Metode Pemilihan Model

Pemilihan model tergantung pada asumsi yang digunakan oleh peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu yang harus dilakukan pertama kali adalah memilih model yang tepat dari tiga model yang ada. Untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan dalam mengolah data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain dengan menggunakan Uji Chow (*Common Effect vs Fixed Effect*), Uji Hausman (*Fixed Effect vs random Effect*), dan Uji Lagrange Multiplier (*Effect vs Common Effect*). Berikut merupakan hasil dari pemilihan model regresi data panel dalam penelitian ini :

Tabel 3. 5 Tabel Pemilihan Model

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	Prob. > 0,05	CEM
	Prob. < 0,05	FEM
Uji Hausman	Prob. > 0,05	REM
	Prob. < 0,05	FEM
Uji Legrange Multiplier	Prob. > 0,05	CEM
	Prob. < 0,05	REM

3.4.3.1 Uji Chow

Uji *Chow* digunakan untuk memilih model terbaik antara Model efek tetap atau *Fixed Effect Model* (FEM) dan Model efek umum atau *Common Effect Model* (CEM). Uji ini didasarkan pada hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan efek individu, sehingga *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM). Jika hipotesis nol diterima, maka model yang lebih sederhana, yaitu CEM, lebih tepat untuk digunakan. Sebaliknya, jika hipotesis nol ditolak, model yang lebih kompleks, yaitu FEM, dianggap lebih sesuai (Baltagi, 2005).

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H_0 : Model efek umum atau *Common Effect Model* (CEM) lebih sesuai dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM)
- H_1 : Model efek tetap atau *Fixed Effect Model* (FEM) lebih sesuai dibandingkan *Common Effect Model* (CEM)

Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas dari *Cross-section chi-square*. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa FEM lebih tepat dibandingkan CEM. Namun, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, H_0 diterima, sehingga CEM dianggap lebih sesuai untuk digunakan (Gujarati, D. N., & Porter, 2009).

3.4.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih dua model regresi, antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat korelasi antara kesalahan individu dengan variabel independen. Hipotesis nol dari uji ini menyatakan bahwa tidak ada korelasi tersebut, sehingga *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan daripada *Fixed Effect Model* (FEM), (Gujarati, D. N., & Porter, 2009).

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H_0 : *Random Effect Model* (REM) lebih sesuai dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM)
- H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM) lebih sesuai dibandingkan *Random Effect Model* (REM)

Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas dari *Cross-section Random*. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa FEM lebih sesuai dibandingkan REM. Namun, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, sehingga REM dianggap lebih tepat untuk digunakan (Baltagi, 2005)

3.4.3.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji pemilihan model terakhir adalah uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji ini digunakan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dengan melakukan uji LM, peneliti dapat melihat apakah ada hubungan antar *error* komposisi dalam model. Apabila hipotesis nol dari uji ini menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan tersebut, maka *Common Effect Model* (CEM) lebih sesuai dibandingkan *Random Effect Model* (REM). Uji yang digunakan untuk memilih model terbaik antara CEM dan REM ini diperkenalkan oleh *Breusch dan Pagan*, dan dikenal sebagai Uji *Lagrange Multiplier* (BP-LM) (Gujarati, D. N., & Porter, 2009).

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H_0 : *Common Effect Model* (CEM) lebih sesuai dibandingkan *Random Effect Model* (REM)
- H_1 : *Random Effect Model* (REM) lebih sesuai dibandingkan *Common Effect Model* (CEM)

Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas (*Both*) dari uji *Breusch-Pagan*. Jika nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa REM lebih tepat dibandingkan CEM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, dan CEM dianggap lebih sesuai untuk digunakan (Baltagi, 2005).

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Pengujian asumsi klasik memiliki tujuan untuk menguji dan menentukan kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian. Oleh sebab itu sebelum dilakukan regresi linier berganda, peneliti perlu

memenuhi syarat-syarat untuk lolos uji asumsi klasik, namun ketika melakukan regresi data panel tidak semua uji asumsi klasik diperlukan, sebab model regresi data panel dianggap bersifat linier. Menurut Akbary (2017), uji normalitas bukan syarat untuk BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dan uji autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Sementara uji multikolinearitas perlu diuji saat regresi linier dengan lebih dari satu variabel bebas dan uji heteroskedastisitas umumnya ditemukan pada data *cross section*, di mana data panel lebih mirip dengan data cross section dibandingkan time series. Berikut ini adalah beberapa jenis uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan program *Eviews 12*, antara lain :

3.4.4.1 Uji Multikolinieritas

Uji Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki hubungan atau korelasi dengan model regresi (Ghozali, 2016). Jika tidak ada korelasi antara variabel independen, maka model regresi dianggap baik. Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan metode Korelasi *Pearson*. Korelasi *Pearson* adalah jenis korelasi yang digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil-hasil pengamatan dari populasi dengan dua variabel (bivariate) yang berdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan terdiri dari dua pernyataan. Pertama, H_0 menyatakan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi. Sebaliknya, H_a mengindikasikan bahwa terdapat multikolinieritas di antara variabel-variabel tersebut. Untuk menentukan keputusan dalam uji multikolinieritas menggunakan metode Korelasi *Pearson*, ditetapkan kriteria tertentu. Jika nilai korelasi antara variabel independen kurang dari 0,85, maka H_0 diterima, yang berarti tidak ada multikolinieritas. Namun, jika nilai korelasi tersebut lebih besar dari 0,85, maka H_0 ditolak, menunjukkan adanya multikolinieritas di antara variabel-variabel independen dalam model regresi (Napitupulu, R. B.*et al*, 2021).

3.4.4.2 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2016) Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan varians residual di antara pengamatan dalam suatu model regresi. Jika varians residual antar pengamatan tetap, kondisi ini disebut homoskedastisitas, sedangkan jika bervariasi disebut heteroskedastisitas. Model yang ideal adalah model tanpa adanya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji ARCH digunakan untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedasitas apabila nilai signifikansinya $> 0,05$. Sebaliknya, terjadi heteroskedasitas apabila nilai signifikansinya $< 0,05$ (Ghozali, 2016).

Hipotesis dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji ARCH adalah hipotesis nol (H_0) menyatakan Hipotesis nol (H_0) mengemukakan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Untuk menentukan penerimaan atau penolakan H_0 , kaidah keputusan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai probabilitas F terhadap taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. H_0 diterima apabila nilai probabilitas F lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang menandakan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model.

3.4.4.3 Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara kesalahan pada periode $t-1$ dengan kesalahan yang memengaruhi pada periode t dalam model regresi linier (Ghozali, 2016). Autokorelasi terjadi karena ada persyaratan informasi individu atau pengumpulan informasi yang umumnya akan mempengaruhi orang dan kelompok dalam waktu dekat. Jika tidak ada unsur autokorelasi dalam pengujian, maka dianggap baik. Salah satu uji yang bisa digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Breusch Godfrey* atau disebut dengan Lagrange Multiplier.

Dalam pengujian autokorelasi, terdapat dua hipotesis yang diajukan. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi,

sedangkan hipotesis alternatif (H_a) mengindikasikan adanya autokorelasi. Untuk menentukan keputusan dalam uji autokorelasi menggunakan metode *Breusch Godfrey*, kaidah yang digunakan adalah sebagai berikut: jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol diterima. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5%, hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan adanya autokorelasi dalam model regresi tersebut.

3.4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan peneliti pada data panel dalam penelitian ini meliputi uji regresi parsial (t), Uji regresi simultan (F), dan Uji koefesien Determinasi (R^2), berikut adalah penjelasan dari masing-masing pengujian hipotesis tersebut:

3.4.5.1 Uji Parsial (Uji t)

(Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa Uji t digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian yang melibatkan variabel independen yang memiliki pengaruh parsial terhadap variabel dependen. *T-test* ini berfungsi untuk menentukan apakah rata-rata dari dua sampel acak yang diambil dari populasi yang sama menunjukkan perbedaan yang signifikan atau tidak. Pengujian dilakukan dengan memeriksa nilai probabilitas atau dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel.

Kriteria pengujian untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 atau t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau t hitung lebih kecil dari t tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk menghitung nilai t tabel, digunakan fungsi *TINV(probability; deg_freedom)*. Dalam perhitungan ini, probabilitas ditetapkan sebesar 0,05. Derajat kebebasan (*deg_freedom*) dihitung dengan mengurangi jumlah sampel sebanyak 2, sehingga dengan jumlah sampel sebesar 250, diperoleh *deg_freedom* sebesar 248. Berdasarkan perhitungan ini, nilai t tabel yang dihasilkan adalah 1,969576. Nilai

ini digunakan sebagai batas kritis dalam uji t pada tingkat signifikansi 5% (0,05), untuk menentukan apakah hasil uji signifikan.

3.4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut (Darma, 2021), uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara bersamaan memengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan ketika terdapat dua atau lebih variabel independen, dengan cara membandingkan nilai F hitung dan Ftabel. Kriteria evaluasinya adalah :

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, variabel independen secara simultan dipengaruhi oleh variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, variabel independen tidak dipengaruhi secara simultan oleh variabel dependen.

Untuk menghitung nilai f tabel, digunakan rumus $F.INV.RT(probability; deg_freedom1; deg_freedom2)$. Pada perhitungan ini, tingkat probabilitas atau signifikansi ditetapkan sebesar 0,05. Derajat kebebasan pertama ($deg_freedom1$) dihitung dengan mengurangi jumlah variabel sebanyak satu, sehingga dengan jumlah variabel 4, diperoleh $deg_freedom1$ sebesar 3. Selanjutnya, derajat kebebasan kedua ($deg_freedom2$) dihitung dari jumlah sampel dikurangi jumlah variabel, yaitu $250 - 4$, sehingga menghasilkan $deg_freedom2$ sebesar 246. Berdasarkan perhitungan ini, diperoleh nilai f tabel sebesar 2,641296, yang merupakan nilai kritis untuk uji F pada tingkat signifikansi 5% (0,05)

3.4.5.3 Uji Koefesien Determinasi (R^2)

Sujarweni (2015) berpendapat bahwa koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X). Jika R^2 semakin besar, maka persentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X) semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika R^2 semakin kecil, maka persentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X) semakin rendah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Objek Penelitian ini adalah perusahaan sub sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2023. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara komisaris independen, Kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Dari total jumlah 105 perusahaan sub sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, sampel ditentukan melalui metode purposive sampling, di mana populasi diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 50 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

4.2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Statistik memberikan gambaran mengenai data penelitian melalui nilai rata-rata, standar deviasi, varian, nilai minimum, maksimum, jumlah, rentang, *kurtosis*, dan *skewness*. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (Y) yaitu *tax avoidance*, sedangkan variabel independen (X) mencakup komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal. Hasil deskriptif disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	KD_X1	KI_X2	KRF_X3	CETR_Y
Mean	0,519905	0,811336	0,095455	0,240850
Median	0,500000	0,856000	0,000000	0,222500
Maximum	0,750000	0,999000	1,000000	0,827000
Minimun	0,333000	0,350000	0,000000	0,002000
Std. Dev.	0,108164	0,151161	0,294512	0,139250
Skewness	0,081556	-0,800172	2,753492	1,571117
Kurtosis	2,631058	2,744567	8,581718	7,179978

Sumber : *Output Eviews12* (Data diolah, 2024)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1, variabel komisaris independen (KD_X₁) menunjukkan kondisi yang seimbang. Rata-rata perusahaan dalam sampel memiliki nilai 0,519905 atau sekitar 51,9% komisaris independen, yang berarti lebih dari separuh perusahaan memiliki komisaris independen yang memadai sesuai dengan aturan tata kelola perusahaan. Nilai median dengan nilai 0.500000 mengindikasikan bahwa setengah dari perusahaan memiliki setidaknya 50% komisaris independen. Rentang nilai maksimum sebesar 0,333000 tercatat oleh perusahaan BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) pada tahun 2023, sedangkan nilai minimum adalah 0,750000 diperoleh pada perusahaan Asuransi Bina Dana Arta Tbk. (ABDA) pada tahun 2023. Dengan deviasi standar 0,108164, perbedaan proporsi komisaris independen antar perusahaan bisa dikatakan ada, tetapi tidak terlalu mencolok.

Untuk variabel kepemilikan institusional (KI_X₂), data menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki nilai 0,811336 atau 81,1% saham yang dimiliki oleh institusi. Median sebesar 0,856000 atau 85,6% menunjukkan bahwa lebih dari setengah perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang sangat tinggi. Nilai minimum sebesar 0,350000 terdapat pada perusahaan Bank Ganesha Tbk. (BGTG) pada tahun 2023 dan nilai maksimum mencapai 0,999000 pada Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) tahun 2023, menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar perusahaan. Sebagian besar perusahaan cenderung memiliki kepemilikan institusional yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh skewness negatif (-0,800172). Deviasi standar sebesar 0,151161 atau 15% menunjukkan variasi yang wajar, sehingga data ini dapat dianggap cukup stabil dan baik untuk analisis lebih lanjut.

Sementara itu, variabel kompensasi rugi fiskal (KRF_X₃) menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan hanya menggunakan kompensasi rugi fiskal sebesar 0,095455. Sebagian besar perusahaan tidak memanfaatkan kompensasi rugi fiskal, terlihat dari nilai median 0, yang berarti lebih dari setengah perusahaan dalam sampel tidak menggunakan fasilitas ini. Skewness yang sangat tinggi (2,753492) mengindikasikan bahwa hanya sedikit perusahaan yang menggunakan kompensasi rugi fiskal dalam jumlah besar, sedangkan mayoritas tidak. Dengan deviasi standar sebesar 0,294512, terdapat perbedaan yang cukup besar di antara perusahaan yang

menggunakan fasilitas ini. Distribusi data yang tidak merata ini menunjukkan bahwa penggunaan kompensasi rugi fiskal tidak umum di antara perusahaan sampel.

Variabel *tax avoidance* (CETR_Y) menunjukkan rata-rata rasio *tax avoidance* sebesar 0,240850 atau 24,1%, yang berarti ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan melakukan penghindaran pajak pada tingkat yang cukup signifikan. Nilai minimum sebesar 0,002000 pada perusahaan Bank Permata Tbk. (BNLI) pada tahun 2020 menunjukkan indikasi *tax avoidance* yang tinggi. Sedangkan nilai maximum sebesar 0,827000 pada perusahaan Asuransi Bina Arta Tbk. (ABDA) pada tahun 2023 menunjukkan indikasi *tax avoidance* yang rendah., yang membuat distribusi data menjadi tidak merata. *Skewness* yang sebesar 1,571117 dan *kurtosis* sebesar 7,179978 menunjukkan adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dalam jumlah besar. Perusahaan-perusahaan dengan nilai *tax avoidance* ekstrem ini menciptakan variasi yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh deviasi standar 0,139250.

4.3 Regresi Data Panel

4.3.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam mengolah data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain dengan menggunakan Uji Chow (*Common Effect vs Fixed Effect*), Uji Hausman (*Fixed Effect vs random Effect*), dan Uji *Lagrange Multiplier (Effect vs Common Effect)*. Dari ketiga pengujian tersebut akan ditentukan model terbaik yang akan digunakan pada regresi data panel dalam penelitian ini.

4.3.1.1 Hasil Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang lebih tepat. Terdapat dua hipotesis, yaitu H_0 menyatakan CEM yang sesuai, sedangkan H_1 menyatakan FEM lebih sesuai. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, H_0 ditolak, menunjukkan REM lebih tepat daripada CEM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, H_0 diterima, dan CEM dianggap lebih sesuai.

Tabel 4. 2 Hasil Uji *Chow*

Likehood Rattio test

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	2,470533	(43,173)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	105,326020	43	0,0000

Sumber : *Output Eviews12* (Data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.2 Hasil Uji Chow, terdapat indikator yang digunakan untuk memutuskan model yang lebih tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), yaitu nilai signifikansi *Cross-section Chi-square*. Nilai probabilitas untuk *Cross-section Chi-square* adalah 0,0000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa *Common Effect Model* lebih sesuai, ditolak. **Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang lebih tepat digunakan.**

4.3.1.2 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman membandingkan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) untuk menentukan model yang lebih baik. Terdapat dua hipotesis, yaitu H_0 menyatakan REM yang tepat, dan H_1 menyatakan FEM lebih sesuai. Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas dari *Cross-section Random*. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, H_0 ditolak, menunjukkan FEM lebih sesuai. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, H_0 diterima, sehingga REM dianggap lebih tepat.

Tabel 4. 3 Hasil Uji *Hausman*

Hausman test

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-sq.d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	0,815566	3	0,8457

Sumber : *Output Eviews12* (Data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman, nilai probabilitas (Prob.) untuk *Cross-section random* adalah 0,815566. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai probabilitas melebihi 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima.

Dalam kasus ini, nilai probabilitas 0,8457 jauh lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Ini menunjukkan bahwa model yang lebih tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM), bukan *Fixed Effect Model* (FEM). **Dengan demikian, Random Effect Model (REM) dianggap lebih sesuai untuk menganalisis data ini.**

4.3.1.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) merupakan tahap akhir yang digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat *antara Random Effect Model* (REM) dan *Common Effect Model* (CEM). Terdapat dua hipotesis: H_0 menyatakan CEM lebih cocok, sedangkan H_1 menyatakan REM lebih tepat. Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas dari uji *Breusch-Pagan*. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, H_0 ditolak, menunjukkan REM lebih tepat. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, H_0 diterima, dan CEM dianggap lebih sesuai.

Tabel 4. 4 Hasil Uji *Lagrange Multiplier*
Lagrange Multiplier test

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
<i>Breusch-Pagan</i>	21,63063 (0,0000)	3,843373 (0,0499)	25,47400 (0,0000)

Sumber : *Output Eviews12* (Data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.4 Hasil dari Uji Lagrange Multiplier menunjukkan nilai Cross-section *Breusch-Pagan* sebesar 0,0163. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dalam hal ini, nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05 mengakibatkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, **yang menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) lebih tepat.**

4.3.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Setelah melakukan serangkaian pengujian, termasuk uji *Chow*, uji *Hausman*, dan *uji Lagrange Multiplier*, hasilnya menunjukkan bahwa model regresi data panel yang paling sesuai untuk penelitian ini adalah *Random Effect Model*

(REM). Model ini dipilih karena lebih akurat dalam menggambarkan hubungan antar variabel dalam data panel yang dianalisis. Berikut adalah bentuk model regresi yang digunakan:yang dianalisis. Adapun bentuk model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Model Regresi Data Panel

Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,171164	0,079802	2,144849	0,0331
KD_X1	0,100456	0,104262	0,963502	0,3364
KI_X2	0,029712	0,079793	0,372357	0,7100
KRF_X3	-0,069644	0,040862	-1,704370	0,0897

Sumber : *Output Eviews12* (Data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.5 Model Regresi *Random Effect Model* (REM), maka dapat disusun persamaan sebagai berikut :

$$\text{CETR_Y} = 0,171164 + 0,100456 \text{ KD_X1} + 0,029712 \text{ KI_X2} - 0,069644 \text{ KRF_X3} \\ + [\text{CX=R}]$$

Keterangan :

- CETR_Y : *Tax Avoidance*
- KD_X1 : Komisaris Independen
- KI-X2 : Kepemilikan Institusional
- KRF_X3 : Kompensasi Rugi Fiskal

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian ini. Hubungan ini menjelaskan bagaimana masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam model yang telah dibuat.sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,171164 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel komisaris independen (KD_X1), kepemilikan institusional (KI_X2), dan kompensasi rugi fiskal (KRF_X3), variabel *tax avoidance* (CETR_Y) akan mengalami peningkatan sebesar 17%. Ini memberikan

- gambaran tentang nilai dasar dari variabel dependen ketika tidak ada pengaruh dari ketiga variabel independen tersebut.
2. Koefisien beta untuk variabel komisaris independen (KD_X₁) sebesar 0,100456 menunjukkan bahwa jika variabel lain tetap konstan dan komisaris independen (KD_X₁) meningkat sebesar 1%, maka *tax avoidance* (CTER_Y) akan meningkat sebesar 10%. Sebaliknya, jika komisaris independen (KD_X₁) menurun sebesar 1%, maka *tax avoidance* (CTER_Y) akan mengalami penurunan yang sama, yaitu sebesar 10%.
 3. Koefisien beta untuk variabel kepemilikan institusional (KI_X₂) sebesar 0,029712 menunjukkan bahwa jika variabel lain tetap konstan dan kepemilikan institusional (KI_X₂) meningkat sebesar 1%, maka CTER_Y akan meningkat sebesar 2,9%. Demikian juga, jika kepemilikan institusional (KI_X₂) menurun sebesar 1%, maka *tax avoidance* (CTER_Y) akan menurun sebesar 2,9%.
 4. Selanjutnya, variabel kompensasi rugi fiskal (KRF_X₃) memiliki koefisien sebesar -0,069644, yang menunjukkan bahwa jika variabel lain tetap konstan dan kompensasi rugi fiskal (KRF_X₃) meningkat sebesar 1%, maka *tax avoidance* (CTER_Y) akan menurun sebesar 6,9%. Sebaliknya, jika kompensasi rugi fiskal (KRF_X₃) menurun sebesar 1%, maka *tax avoidance* (CTER_Y) akan meningkat sebesar 6,9%

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada data panel dilakukan untuk memastikan model regresi valid, mendeteksi masalah seperti multikolinearitas dan heteroskedastisitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas analisis dan keakuratan hasil penelitian.

4.4.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan oleh peneliti untuk membuktikan tidak ada korelasi antara variabel independen, yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Variable</i>	KD_X1	KI_X2	KRF_X3
KD_X1	1,000000	0,157992	-0,183762
KI_X2	0,157992	1,000000	-0,054368
KRF_X3	-0,183762	-0,054368	1,000000

Sumber : *Output Eviews12* (Data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas, nilai korelasi KD_X1 dan KI_X2 sebesar $0,157992 < 0,85$, nilai korelasi KD_X1 dan KRF_X3 sebesar $-0,183762 < 0,85$ dan X2 dan X3 sebesar $-0,054368 < 0,85$. Maka dapat disimpulkan tidak ada indikasi adanya multikolinieritas diantara variabel-variabel KD_X1, KI_X2 dan KRF_X3. **Dengan kata lain, masing-masing variabel bebas cukup independen satu sama lain, sehingga terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolineritas** (Napitupulu *et al.*, 2021).

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan oleh peneliti untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam satu pengamatan.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heterokedasticity : Glejser test

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0,053547	0,059315	0,902756	0,3677
KD_X1	0,105393	0,077447	1,360833	0,1750
KI_X2	-0,022774	0,059326	-0,383881	0,7014
KRF_X3	0,003591	0,030378	0,118196	0,9060

Sumber : *Output Eviews12* (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas diketahui bahwa Komisaris Independen (KD) sebagai X1 memiliki nilai probabilitas 0,1750, yang lebih besar dari 0,05. Sementara itu, Kepemilikan Institusional (KI) sebagai X2 memiliki nilai probabilitas 0,7014, juga lebih besar dari 0,05. Kompensasi Rugi Fiskal (KRF) sebagai X3 menunjukkan nilai probabilitas 0,9060, yang juga lebih

besar dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, **yang berarti tidak terjadi masalah ketidaksamaan varian sehingga lolos uji heteroskedastisitas.**

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t dalam regresi data panel digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel independen berpengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Parsial (Uji t)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0,171164	0,079802	2,144849	0,0331
KD_X1	0,100456	0,104262	0,963502	0,3364
KI_X2	0,029712	0,079793	0,372357	0,7100
KRF_X3	-0,069644	0,040862	-1,704370	0,0897

Sumber : *Output Eviews12* (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.8 Hasil Uji t yang digunakan untuk mengukur pengaruh setiap variabel independen terhadap *tax avoidance*, diketahui bahwa tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada hasil Uji t, variabel Komisaris Independen (KD_X1) memiliki koefisien sebesar 0,100456, dengan standar *error* 0,104262, dan nilai t-statistik 0,963502 yang lebih kecil dari t tabel 1,969576. Nilai probabilitas yang didapat adalah 0,3364, yang lebih besar dari 0,05, **sehingga Ho diterima dan H₁ ditolak, menandakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.**

Selanjutnya, variabel Kepemilikan Institusional (KI_X2) menunjukkan koefisien 0,029712, dengan standar *error* 0,079793, dan nilai t-statistik 0,372357, yang juga lebih kecil dari t tabel 1,969576. Nilai probabilitas untuk variabel ini adalah 0,7100, yang lebih besar dari 0,05, **sehingga Ho diterima dan H₂ ditolak, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.**

Terakhir, untuk variabel Kompensasi Rugi Fiskal (KRF_X3), diperoleh koefisien -0,069644, dengan standar *error* 0,040862, dan nilai t-statistik 1,704370, yang lebih kecil dari t tabel 1,969576. Nilai probabilitas untuk variabel ini adalah 0,0897, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, **Ho diterima dan H₃ ditolak**, menunjukkan bahwa **Kompensasi Rugi Fiskal tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.**

4.5.2 Uji Simultan (Uji f)

Pengujian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel *tax avoidance* dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel komisaris independen, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan (Uji f)

<i>R-squared</i>	0,021859	<i>Mean dependent var</i>	0,148581
<i>Adjusted R-squared</i>	0,008273	<i>S.D. dependent var</i>	0,120807
<i>S.E. of regression</i>	0,120306	<i>Sum squared resid</i>	3,126302
<i>F-statistic</i>	1,609000	<i>Durbin-Watson stat</i>	1,629610
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,188245		

Sumber : *Output Eviews12* (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.9 Hasil Regresi Uji f menunjukkan Nilai Fhitung sebesar 1,609000 lebih kecil dari f tabel yaitu 2,641296 dan nilai signifikasinya yaitu 0,188245 lebih besar dari 0,05. **Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen, yaitu variabel Komisaris Independen (KD), Kepemilikan Institusional (KI) dan kompensasi rugi fiskal (KRF) tidak berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen.**

4.5.3 Uji Koefesien Determinasi

Pengujian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen, yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal, mampu menjelaskan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefesien Determinasi

<i>R-squared</i>	0,021859	<i>Mean dependent var</i>	0,148581
Adjusted R-squared	0,008273	<i>S.D. dependent var</i>	0,120807
<i>S.E. of regression</i>	0,120306	<i>Sum squared resid</i>	3,126302
<i>F-statistic</i>	1,609000	<i>Durbin-Watson stat</i>	1,629610
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,188245		

Sumber : Output Eviews12 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.10 Hasil Regresi Uji f menunjukkan nilai *Adjusted-squared* sebesar 0,008273 atau sebesar 0,8%. Nilai koefesien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen (X) yaitu komisaris independen (KD), kepemilikan institusional (KI) dan kompensasi rugi fiskal (KRF) dapat menjelaskan variabel dependen (Y) yaitu penghindaran pajak sebesar 0,8%, sementara 99,2% (100% - 0,8%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

4.6 Pembahasan

Analisis yang telah dilakukan dengan regresi data panel menggunakan *Eviews12* bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Tabel berikut merangkum hubungan antara variabel independen dan variabel dependen pada hasil penelitian ini.

Tabel 4. 11 Tabel Hubungan Variabel Independen terhadap Tax Avoidance

Variabel	Hubungan	Signifikansi
Komisaris Independen (KD)	Tidak berpengaruh	Tidak signifikan
Kepemilikan Institusional (KI)	Tidak berpengaruh	Tidak signifikan
Kompensasi Rugi Fiskal (KRF)	Tidak berpengaruh	Tidak signifikan

4.6.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t pada variabel Komisaris Independen (KD), hipotesis awal ditolak, yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dalam konteks

pengawasan manajemen dan pengurangan praktik *tax avoidance*. Temuan ini ini sejalan dengan teori agensi, yang menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam teori agensi, komisaris independen diharapkan mampu mengawasi manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Namun, dalam praktiknya, komisaris independen seringkali mengalami keterbatasan wewenang, akses informasi, dan potensi bias akibat hubungan personal dengan manajemen, yang mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa meskipun komisaris independen memiliki peran dalam tata kelola perusahaan, efektivitasnya dalam mengendalikan tax avoidance tetap terbatas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal.

Penelitian sebelumnya oleh Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) menunjukkan hasil yang berbeda, dengan menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif dalam mencegah terjadinya *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Taebenu & Valentine Siagian (2023) serta Mulyana *et al.* (2020), yang menunjukkan bahwa meskipun peran komisaris independen penting dalam pengawasan, pengaruh mereka terhadap praktik penghindaran pajak tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peran mereka dalam pengambilan keputusan terkait pajak. Kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance* dapat terjadi karena fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik, yang disebabkan oleh ketidakmampuan sebagian anggota dewan komisaris independen untuk menunjukkan independensinya (Oktavia *et al.*, 2020).

4.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis uji t, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua ditolak. Data menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di sub sektor keuangan dan perbankan yang diteliti memiliki nilai 0,811336, atau 81% dari saham yang dimiliki oleh institusi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi. Kepemilikan

institusional yang besar sering kali diasosiasikan dengan kontrol yang lebih kuat terhadap manajemen, karena institusi tersebut dianggap lebih memperhatikan pengelolaan risiko, termasuk risiko pajak, serta berupaya menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan pemerintah. Hasil penelitian ini didukung oleh teori agensi, yang menggambarkan adanya konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam teori ini, kepemilikan institusional diharapkan mampu memberikan pengawasan yang lebih kuat terhadap manajemen karena institusi biasanya memiliki sumber daya dan pengetahuan yang lebih besar untuk memonitor aktivitas perusahaan, termasuk kepatuhan pajak. Namun, dalam kenyataannya, kepemilikan institusional mungkin tidak cukup efektif dalam mengurangi tax avoidance karena institusi seringkali lebih fokus pada hasil keuangan jangka pendek yang menguntungkan mereka sebagai investor. Selain itu, beberapa institusi tidak memiliki insentif untuk mengawasi praktik penghindaran pajak secara ketat jika strategi tersebut dapat meningkatkan laba jangka pendek.

Temuan ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh *Pramesti et al.* (2022) dan (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021), yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif. Selain itu, *Wang et al.* (2020) menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional yang luas dapat menekan penghindaran pajak, yang bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, karena menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih ketat dari pemilik institusional tidak selalu efektif dalam mengurangi perilaku penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari *Daniel et al.* (2022) dan *Setyarini et al.* (2023), yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik institusional berperan sebagai pemegang saham pasif dan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan sehari-hari perusahaan, sehingga mereka tidak memiliki kontrol yang signifikan terhadap kebijakan penghindaran pajak. Pemilik institusional lebih fokus pada keputusan manajerial yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, yang tidak selalu sejalan dengan praktik penghindaran pajak, sehingga kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.6.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis uji t, dapat disimpulkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal (KRF) tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dalam sub sektor keuangan dan perbankan yang menjadi objek penelitian tidak memanfaatkan kompensasi rugi fiskal. Dengan demikian, penggunaan kompensasi tersebut tidak secara substansial memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan kompensasi rugi fiskal tidak selalu menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi, yang menunjukkan bahwa adanya kompensasi rugi fiskal saja tidak cukup untuk mengurangi praktik tax avoidance, karena keputusan manajemen sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan tujuan jangka pendek yang tidak selalu selaras dengan optimalisasi pengelolaan pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan sebelumnya oleh Mulyana *et al.* (2020) dan Rinaldi *et al.* (2023), yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Isnanto *et al.* (2019) dan Pramesti *et al.* (2022), yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Meskipun kompensasi rugi fiskal dapat mengurangi beban pajak perusahaan, hal ini tidak selalu mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena mereka cenderung memilih untuk memanfaatkan kompensasi tersebut secara legal dan transparan. Selain itu, perusahaan lebih mengutamakan strategi jangka panjang yang menjaga reputasi dan integritas di hadapan pemangku kepentingan, daripada terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi (Mita Dewi, 2019).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 - 2023, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa komisaris independen dalam struktur perusahaan di sub sektor keuangan dan perbankan belum mampu secara signifikan mengurangi atau meningkatkan penghindaran pajak.
2. Kepemilikan Institusional juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional sering dianggap sebagai alat pengawasan yang kuat. Meskipun berdasarkan data menunjukkan proporsi kepemilikan institusi yang tinggi pada sektor keuangan dan perbankan, namun dalam penelitian ini terbukti bahwa pengaruh kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance* tidak ada.
3. Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Walaupun kompensasi rugi fiskal memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui pengurangan laba kena pajak di tahun-tahun mendatang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kompensasi tersebut tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

5.2 Implikasi Penelitian

Berikut ini adalah implikasi teoritis dan praktis yang timbul sebagai hasil atau konsekuensi dari temuan dalam penelitian ini mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor keuangan dan perbankan di BEI periode 2019-2023 :

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menambah wawasan dalam literatur mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor keuangan dan perbankan. Hasil yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, analisis dapat diperluas untuk penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan variabel lain yang lebih relevan dalam memengaruhi penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan di sektor keuangan dan perbankan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal) dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Oleh karena itu, perusahaan di sektor keuangan dan perbankan perlu lebih efektif memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, mereka harus memperkuat peran komisaris independen dalam mengawasi kebijakan perpajakan. Kepemilikan institusional sebaiknya lebih aktif memantau praktik pajak perusahaan, dan pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kompensasi rugi fiskal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi penghindaran pajak secara legal dan bertanggung jawab.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang dapat diperbaiki oleh studi-studi mendatang untuk meningkatkan kualitas penelitian sebelumnya. Batasan tersebut meliputi :

1. Penelitian ini hanya fokus pada tiga variabel independen, padahal masih banyak faktor lain yang dapat berkontribusi dalam memprediksi penghindaran pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa lebih dari 90% penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkup penelitian ini.

2. Penelitian ini hanya mencakup perusahaan yang berada dalam subsektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk sektor industri lainnya.
3. Penelitian ini hanya mencakup periode waktu dari tahun 2019 - 2023, yang belum cukup mencerminkan fenomena yang lebih luas dalam kebijakan perpajakan dan praktik bisnis jangka panjang.

5.4 Saran Penelitian

Adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini perlu menjadi perhatian untuk pengembangan penelitian di masa depan agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, seperti ukuran perusahaan, strategi manajemen pajak, dan faktor-faktor eksternal lainnya.
2. Bagi Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup perusahaan dari sektor industri lain, tidak hanya terbatas pada subsektor keuangan dan perbankan, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penghindaran pajak di berbagai sektor.
3. Disarankan agar peneliti di masa mendatang memperluas jangkauan waktu penelitian dengan mencakup tahun-tahun sebelumnya atau setelah periode 2019-2023, sehingga dapat mencakup perubahan dinamika dalam kebijakan perpajakan dan praktik bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- 2020, T. J. N. (2020). The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. *Tax Justice Network*, November, 1–83. <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/> (diakses tanggal 03 Agustus 2024, Pukul 10.45).
- Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi DireksiArdiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen ST. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1). <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.719>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. John Wiley & Sons.
- Daniel, M., Ridwansyah, E., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI 2017 - 2019. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(2), 130–141. <https://doi.org/10.25181/esai.v16i2.2549>
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia.
- Dewi, Y. S., & Subardjo, A. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Mekanisme Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(11).
- Drake, K. D., Hamilton, R., & Lusch, S. J. (2020). Are declining effective tax rates indicative of tax avoidance? Insight from effective tax rate reconciliations. *Journal of Accounting and Economics*, 70(1), 101317. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101317>
- Ghozali, I. (2016). *Applikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (Ed. 8). Semarang : Universitas Diponegoro.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
- Isnanto, H. D., Majidah, & Kurnia. (2019). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal. *E-Proceeding of Management*, 6(2).
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (2024). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat> (diakses tanggal 01 Agustus 2024, Pukul 13.00)
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 160–172. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>
- Napitupulu, R. B., Simajuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS – STATA – Eviews* (1st ed.). Madenatera.
- Nufus, W. H. (2024). *Rafael Alun Divonis Terima Gratifikasi Rp 10 M, Begini Perhitungannya*. 8 Januari. <https://news.detik.com/berita/d-7130818/rafael-alun-divonis-terima-gratifikasi-rp-10-m-begini-perhitungannya> (diakses tanggal 30 September 2024, Pukul 18.45)

- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance: is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, 49(5), 565–583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- OECD. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Property Taxation in Asia. In *OECD Tax Statistics (database)* (Issue 28). https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua-new-guinea_d2ecd822-en
- Oktavia, V., Ulfie, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan* (Edisi Revi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Adella, M. P. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Economina*, 1(4), 800–814. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.176>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Rinaldi, M., Harits, M., Khatib, Z., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh Leverage , Intensitas Modal dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 551–566. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam> PENGARUH
- Setyarini, Y., Priscila Chandra, E., Beauty, V., & Novita, V. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3(2), 91–100.

<https://doi.org/10.25047/asersi.v3i2.4442>

Suaidah, Y. M. (2020). *Good Corporate Governance Dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* ((Sutopo, E). ALFABETA.

Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Gajah Mada University Press.

Syakirun Ni'am, D. P. (2023). *Jaksa Bongkar Jejak Operasi "Cuci Uang" Angin Prayitno Aji: Beli Lahan Atas Nama Orang Lain*. 24 Januari. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/24/18174381/jaksa-bongkar-jejak-operasi-cuci-uang-angin-prayitno-aji-beli-lahan-atas> (diakses tanggal 30 September 2024, Pukul 18.45)

Taebenu, T. A., & Valentine Siagian. (2023). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bei Tahun (2017-2021). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(2), 296–302. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1039>

Tang, T. Y. H. (2019). The Value Implications of Tax Avoidance Across Countries. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 34(4), 615–638. <https://doi.org/10.1177/0148558X17742821>

Utami, A. A. Y. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(6). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2156>

Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4),

793–811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>

Yogyapos. (2023). *Tersangka Kasus Pajak Rp 8,3 M Dilimpahkan ke Kejari Kulonprog.* <https://www.yogyapos.com/berita-tersangka-kasus-pajak-rp-83-m-dilimpahkan-ke-kejari-kulonprogo-12188> (diakses tanggal 03 Agustus 2024, Pukul 13.30)

LAMPIRAN 1 : Daftar Perhitungan Komisaris Independen

NO	KODE SAHAM	JUMLAH ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN					TOTAL DEWAN KOMISARIS					PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN (X1)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABDA	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
2	ADMF	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
3	AMAG	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
4	APIC	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
5	ASBI	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
6	ASDM	2	2	2	2	1	4	4	4	4	3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,333
7	ASRM	3	2	2	2	2	4	3	3	3	4	0,750	0,667	0,667	0,667	0,500
8	BACA	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667
9	BBCA	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
10	BBLD	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
11	BBMD	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	0,500	0,500	0,500	0,500	0,750
12	BBNI	5	6	7	7	6	8	8	10	10	11	0,625	0,750	0,700	0,700	0,545
13	BBRI	5	6	6	7	7	8	10	10	10	10	0,625	0,600	0,600	0,700	0,700
14	BBTN	3	3	4	5	5	6	6	7	8	8	0,500	0,500	0,571	0,625	0,625
15	BCAP	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	0,333	0,333	0,333	0,333	0,500

NO	KODE SAHAM	JUMLAH ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN					TOTAL DEWAN KOMISARIS					PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN (X1)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
16	BDMN	4	3	4	4	3	8	8	8	8	6	0,500	0,375	0,500	0,500	0,500
17	BFIN	3	3	2	2	2	7	7	6	5	5	0,429	0,429	0,333	0,400	0,400
18	BGTG	2	2	2	1	2	3	3	3	3	4	0,667	0,667	0,667	0,333	0,500
19	BINA	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667
20	BJBR	3	3	2	3	3	5	5	3	5	6	0,600	0,600	0,667	0,600	0,500
21	BJTM	3	3	2	3	3	6	6	3	5	4	0,500	0,500	0,667	0,600	0,750
22	BMAS	1	1	1	3	3	2	2	2	5	5	0,500	0,500	0,500	0,600	0,600
23	BMRI	7	5	5	5	6	13	10	10	10	11	0,538	0,500	0,500	0,500	0,545
24	BNBA	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	0,667	0,667	0,667	0,500	0,500
25	BNGA	4	3	3	3	4	8	6	6	6	7	0,500	0,500	0,500	0,500	0,571
26	BNII	3	3	4	4	4	6	6	7	8	8	0,500	0,500	0,571	0,500	0,500
27	BNLI	4	4	4	4	4	8	8	7	8	8	0,500	0,500	0,571	0,500	0,500
28	BPFI	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	0,333	0,333	0,333	0,333	0,500
29	BRIS	5	5	5	4	4	9	9	9	9	9	0,556	0,556	0,556	0,444	0,444
30	BSIM	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667
31	BTPN	3	3	3	3	3	5	5	5	6	6	0,600	0,600	0,600	0,500	0,500
32	BTPS	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	0,500	0,500	0,500	0,500	0,750
33	CASA	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

NO	KODE SAHAM	JUMLAH ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN					TOTAL DEWAN KOMISARIS					PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN (X1)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
34	CFIN	2	1	1	1	1	4	3	3	3	3	0,500	0,333	0,333	0,333	0,333
35	FUJI	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
36	LPGI	2	2	2	2	2	3	3	3	3	5	0,667	0,667	0,667	0,667	0,400
37	MAYA	4	3	1	1	1	7	6	3	3	3	0,571	0,500	0,333	0,333	0,333
38	MCOR	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
39	MEGA	3	3	3	2	3	5	5	5	4	5	0,600	0,600	0,600	0,500	0,600
40	MFIN	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	0,333	0,333	0,500	0,500	0,500
41	NISP	6	5	5	4	4	9	8	8	8	8	0,667	0,625	0,625	0,500	0,500
42	PANS	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
43	PNBN	2	3	3	3	3	4	6	6	6	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
44	SDRA	2	2	2	2	2	4	4	3	4	4	0,500	0,500	0,667	0,500	0,500
45	SMMA	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
46	STAR	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
47	TIFA	2	2	2	2	2	4	4	4	3	3	0,500	0,500	0,500	0,667	0,667
48	TRIM	2	2	2	1	1	3	3	3	2	2	0,667	0,667	0,667	0,500	0,500
49	TRUS	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
50	WOMF	2	2	2	2	2	5	5	5	5	3	0,400	0,400	0,400	0,400	0,667

LAMPIRAN 2 : Daftar Perhitungan Kepemilikan Institusional

NO	KODE SAHAM	JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKI INSTITUSI					JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR					KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL (X2)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABDA	386.926.493	386.924.893	386.924.893	588.313.138	588.313.138	620.806.680	620.806.680	620.806.680	620.806.680	620.806.680	0,623	0,623	0,623	0,948	0,948
2	ADMF	920.700.000	920.700.000	920.700.000	920.700.000	920.700.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921
3	AMAG	438.924.000	438.924.000	438.924.000	438.924.200	438.924.200	500.155.000	500.155.000	500.155.000	500.155.250	500.155.250	0,878	0,878	0,878	0,878	0,878
4	APIC	6.386.502.137	5.995.017.387	5.995.017.387	5.015.104.237	4.380.017.387	11.766.313.488	11.766.313.488	11.766.313.488	11.766.313.488	11.766.313.488	0,543	0,510	0,510	0,426	0,372
5	ASBI	284.878.628	286.260.628	286.260.628	286.260.628	286.260.628	348.386.472	348.386.472	348.386.472	348.386.472	348.386.472	0,818	0,822	0,822	0,822	0,822
6	ASDM	140.796.900	162.520.500	162.520.500	162.520.500	325.041.000	192.000.000	192.000.000	192.000.000	192.000.000	384.000.000	0,733	0,846	0,846	0,846	0,846
7	ASRM	55.884.876	62.578.543	62.578.543	62.578.543	62.578.543	234.064.634	304.283.840	304.283.840	304.283.840	304.283.840	0,239	0,206	0,206	0,206	0,206
8	BACA	3.006.203.300	2.803.740.100	2.803.740.100	14.904.480.000	17.907.813.352	7.070.141.850	7.071.413.250	7.078.002.482	19.953.024.885	19.953.024.885	0,425	0,396	0,396	0,747	0,897
9	BBCA	13.545.990.000	13.545.990.000	67.729.950.000	67.729.950.000	67.729.950.000	24.655.010.000	24.655.010.000	123.275.050.000	123.275.050.000	123.275.050.000	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549
10	BBLD	1.204.321.978	1.201.721.978	1.292.952.562	1.112.584.069	1.195.757.969	1.645.796.054	1.645.796.054	1.645.796.054	1.645.796.054	1.645.796.054	0,732	0,730	0,786	0,676	0,727
11	BBMD	3.658.097.600	3.721.117.800	3.721.116.300	3.721.116.000	3.832.122.800	4.090.090.000	4.090.090.000	4.090.090.000	4.090.090.000	4.090.090.000	0,894	0,910	0,910	0,910	0,937
12	BBNI	17.935.461.281	17.382.027.175	17.671.671.886	17.865.373.158	35.699.351.338	18.648.656.458	18.648.656.458	18.648.656.458	18.648.656.458	37.297.312.916	0,962	0,932	0,948	0,958	0,957
13	BBRI	121.993.105.880	120.827.282.776	147.637.608.824	148.546.205.446	148.704.601.207	123.345.810.000	123.345.810.000	151.559.001.604	151.559.001.604	151.559.001.604	0,989	0,980	0,974	0,980	0,981
14	BBTN	10.026.098.441	9.490.159.241	9.626.678.816	11.563.209.465	12.109.056.692	10.590.000.000	10.590.000.000	10.590.000.000	12.887.145.542	14.034.444.413	0,947	0,896	0,909	0,897	0,863
15	BCAP	37.125.338.351	37.919.460.451	39.047.451.051	38.402.523.551	37.348.526.351	38.906.368.927	39.760.851.927	42.618.850.927	42.618.850.927	42.618.850.927	0,954	0,954	0,916	0,901	0,876
16	BDMN	9.196.854.792	9.038.053.192	9.038.053.192	9.038.053.192	9.038.053.192	9.773.552.870	9.773.552.870	9.773.552.870	9.773.552.870	9.773.552.870	0,941	0,925	0,925	0,925	0,925
17	BFIN	9.419.257.300	9.282.981.660	8.672.981.660	8.615.857.938	9.448.662.838	15.967.115.620	15.967.115.620	15.967.115.620	15.967.115.620	15.967.115.620	0,590	0,581	0,543	0,540	0,592

NO	KODE SAHAM	JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKI INSTITUSI					JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR					KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL (X2)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
18	BGTG	9.563.992.606	9.563.992.606	9.046.581.007	21.446.982.783	21.474.502.655	11.175.060.000	11.175.060.000	11.175.060.000	23.970.997.103	23.970.997.103	0,856	0,856	0,810	0,895	0,896
19	BINA	4.941.289.178	4.822.000.378	4.772.000.378	5.810.883.222	6.059.398.557	5.654.375.000	5.654.375.000	5.654.375.000	5.937.093.750	6.134.716.665	0,874	0,853	0,844	0,979	0,988
20	BJBR	7.414.714.661	7.414.714.661	7.414.714.661	7.414.714.661	7.414.714.661	9.838.787.161	9.838.787.161	9.838.787.161	9.838.787.161	10.521.443.686	0,754	0,754	0,754	0,754	0,705
21	BJTM	11.934.147.982	11.934.147.982	11.934.147.982	11.934.147.982	11.934.147.982	15.002.370.582	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795
22	BMAS	4.247.918.985	4.247.918.985	4.248.831.185	8.594.765.254	18.081.853.750	4.443.461.538	4.443.461.538	4.443.461.538	8.620.315.383	18.102.662.304	0,956	0,956	0,956	0,997	0,999
23	BMRI	46.223.989.920	45.934.684.424	46.063.284.267	46.138.710.281	92.026.783.021	46.666.666.666	46.666.666.666	46.666.666.666	46.666.666.666	93.333.333.332	0,991	0,984	0,987	0,989	0,986
24	BNBA	2.100.000.000	2.100.000.000	2.520.000.000	3.105.056.930	3.105.056.930	2.310.000.000	2.310.000.000	2.772.000.000	3.388.000.000	3.388.000.000	0,909	0,909	0,909	0,916	0,916
25	BNGA	23.246.736.329	23.246.736.329	23.246.736.329	23.246.736.329	23.246.736.329	25.131.606.843	25.131.606.843	25.131.606.843	25.131.606.843	25.131.606.843	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925
26	BNII	74.148.047.929	74.148.047.929	74.148.047.929	74.148.042.329	66.848.042.295	76.215.195.821	76.215.195.821	76.215.195.821	76.215.195.821	76.215.195.821	0,973	0,973	0,973	0,973	0,877
27	BNLI	24.991.429.332	27.681.421.384	35.715.192.701	35.715.192.701	35.715.192.701	28.042.739.205	28.042.739.205	36.181.359.520	36.181.359.520	36.181.359.520	0,891	0,987	0,987	0,987	0,987
28	BPFI	1.432.564.399	1.432.564.399	1.430.614.399	2.519.182.750	2.585.341.712	1.782.663.575	1.782.663.575	1.782.663.575	2.673.995.362	2.673.995.362	0,804	0,804	0,803	0,942	0,967
29	BRIS	7.935.308.555	7.909.907.655	38.218.211.452	41.553.600.509	41.553.600.509	9.716.113.498	9.900.508.698	41.129.307.343	46.129.260.138	46.129.260.138	0,817	0,799	0,929	0,901	0,901
30	BSIM	10.649.201.846	10.760.936.114	10.760.936.114	12.437.697.674	12.404.357.896	16.981.803.206	17.461.803.306	17.461.803.306	19.716.162.403	19.716.162.403	0,627	0,616	0,616	0,631	0,629
31	BTPN	7.627.370.842	7.627.370.842	7.627.370.842	7.627.370.842	7.427.370.842	8.148.928.869	8.148.931.869	8.149.106.869	8.149.106.869	8.149.106.869	0,936	0,936	0,936	0,936	0,911
32	BTPS	5.392.590.000	5.392.590.000	5.392.590.000	5.392.590.000	5.392.590.000	7.703.700.000	7.703.700.000	7.703.700.000	7.703.700.000	7.703.700.000	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
33	CASA	40.862.503.632	40.558.083.842	37.861.508.342	36.530.991.842	36.530.991.842	54.476.232.142	54.476.253.593	54.476.269.803	54.476.269.803	54.476.269.803	0,750	0,745	0,695	0,671	0,671
34	CFIN	2.379.190.689	2.379.190.689	2.379.190.689	2.379.190.689	2.379.190.689	3.984.520.457	3.984.520.457	3.984.520.457	3.984.520.457	3.984.520.457	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597
35	FUJI	1.162.101.600	1.182.707.900	1.168.959.300	1.162.101.600	1.162.086.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	0,894	0,910	0,899	0,894	0,894

NO	KODE SAHAM	JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKI INSTITUSI					JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR					KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL (X2)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
36	LPGI	128.378.400	128.378.400	128.378.400	256.756.800	292.092.700	150.000.000	150.000.000	150.000.000	300.000.000	300.000.000	0,856	0,856	0,856	0,856	0,974
37	MAYA	5.946.543.546	5.946.553.546	10.321.160.302	10.224.335.202	8.865.130.589	6.832.410.700	6.832.410.700	11.832.368.850	11.832.368.850	11.832.368.850	0,870	0,870	0,872	0,864	0,749
38	MCOR	9.978.756.012	25.862.696.163	25.864.446.363	25.864.446.363	25.864.446.363	16.631.460.751	37.919.730.514	37.919.730.514	37.919.730.514	37.919.730.514	0,600	0,682	0,682	0,682	0,682
39	MEGA	4.040.095.822	4.463.039.366	4.437.497.376	6.811.830.514	6.811.830.514	6.963.775.206	6.963.775.206	6.963.775.206	11.740.923.365	11.740.923.365	0,580	0,641	0,637	0,580	0,580
40	MFIN	1.866.000.000	1.866.000.000	1.866.000.000	1.866.000.000	1.866.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	0,704	0,704	0,704	0,704	0,704
41	NISP	19.521.391.224	19.521.391.224	19.521.391.224	19.521.391.224	19.521.391.224	22.945.296.972	22.945.296.972	22.945.296.972	22.945.296.972	22.945.296.972	0,851	0,851	0,851	0,851	0,851
42	PANS	424.800.000	424.800.000	424.800.000	424.800.000	424.800.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
43	PNBN	20.438.864.437	20.438.864.437	20.438.864.437	20.438.864.437	20.438.864.437	24.087.645.998	24.087.645.998	24.087.645.998	24.087.645.998	24.087.645.998	0,849	0,849	0,849	0,849	0,849
44	SDRA	5.652.404.084	5.652.404.084	7.610.518.724	7.610.518.724	8.191.570.748	6.580.926.254	6.580.926.254	8.568.234.364	8.568.234.364	8.568.234.364	0,859	0,859	0,888	0,888	0,956
45	SMMA	4.408.172.025	4.173.231.623	3.750.686.475	3.265.257.697	3.290.977.644	6.367.664.717	6.367.664.717	6.367.664.717	6.367.664.717	6.367.664.717	0,692	0,655	0,589	0,513	0,517
46	STAR	4.607.950.700	4.607.950.700	4.684.975.900	4.595.441.200	4.656.839.500	4.800.000.602	4.800.000.602	4.800.000.602	4.800.000.602	4.800.000.602	0,960	0,960	0,976	0,957	0,970
47	TIFA	801.700.000	1.075.869.700	3.539.486.622	3.539.486.622	3.539.486.622	1.079.700.000	1.079.700.000	3.552.213.000	3.552.213.000	3.552.213.000	0,743	0,996	0,996	0,996	0,996
48	TRIM	6.433.122.660	6.426.202.560	6.455.462.060	2.487.383.252	2.570.795.502	7.109.300.000	7.109.300.000	7.109.300.000	7.109.300.000	7.109.300.000	0,905	0,904	0,908	0,350	0,362
49	TRUS	538.520.000	538.520.000	538.520.000	538.520.000	538.520.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673
50	WOMF	3.219.963.329	3.257.246.729	3.220.246.729	3.220.246.729	3.220.246.729	3.484.481.480	3.484.481.480	3.484.481.480	3.484.481.480	3.484.481.480	0,924	0,935	0,924	0,924	0,924

LAMPIRAN 3 : Daftar Perhitungan Kompensasi Rugi Fiskal

NO	KODE SAHAM	IPO	KOMPENSASI RUGI FISKAL (X3)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	ABDA	06/07/1989	0	0	0	0	0
2	ADMF	31/03/2004	0	0	0	0	0
3	AMAG	23/12/2005	0	0	0	0	0
4	APIC	18/12/2002	0	0	0	0	0
5	ASBI	29/11/2016	1	1	1	1	1
6	ASDM	15/12/1989	0	0	0	0	0
7	ASRM	19/03/1990	0	0	0	0	0
8	BACA	04/10/2007	0	0	0	0	0
9	BBCA	31/05/2000	0	0	0	0	0
10	BBLD	07/05/1990	0	0	0	0	0
11	BBMD	08/07/2013	0	0	0	0	0
12	BBNI	25/11/1996	0	0	0	0	0
13	BBRI	10/11/2003	0	0	0	0	0
14	BBTN	17/12/2009	0	0	0	0	0
15	BCAP	08/06/2001	1	1	1	1	1
16	BDMN	06/12/1989	0	0	0	0	0
17	BFIN	16/05/1990	0	0	0	0	0
18	BGTG	12/05/2016	0	0	0	0	0
19	BINA	16/01/2014	0	0	0	0	0
20	BJBR	08/07/2010	0	0	0	0	0
21	BJTM	12/07/2012	0	0	0	0	0
22	BMAS	11/07/2013	0	0	0	0	0
23	BMRI	14/07/2003	0	0	0	0	0
24	BNBA	01/06/2006	0	0	0	0	0
25	BNGA	29/11/1989	0	0	0	0	0
26	BNII	21/11/1989	0	0	0	0	0
27	BNLI	15/01/1990	1	1	1	1	0
28	BPFI	01/06/2009	0	0	0	0	0
29	BRIS	09/05/2018	0	0	0	0	0
30	BSIM	13/12/2010	0	0	0	0	0
31	BTPN	12/03/2008	0	0	0	0	0

NO	KODE SAHAM	IPO	KOMPENSASI RUGI FISKAL (X3)				
			2019	2020	2021	2022	2023
32	BTPS	08/05/2018	0	0	0	0	0
33	CASA	19/07/2016	1	1	1	1	1
34	CFIN	27/08/1990	0	0	0	0	0
35	FUJI	09/07/2019	0	0	0	0	0
36	LPGI	22/07/1997	0	0	0	0	0
37	MAYA	29/08/1997	0	0	0	0	0
38	MCOR	03/07/2007	0	0	0	0	0
39	MEGA	17/04/2000	0	0	0	0	0
40	MFIN	06/09/2005	0	0	0	0	0
41	NISP	20/10/1994	0	0	0	0	0
42	PANS	31/05/2000	0	0	0	0	0
43	PNBN	29/12/1982	0	0	0	0	0
44	SDRA	15/12/2006	0	0	0	0	0
45	SMMA	05/07/1995	0	0	0	0	0
46	STAR	13/07/2011	0	0	0	0	0
47	TIFA	08/07/2011	0	0	0	0	0
48	TRIM	31/01/2000	0	0	0	0	0
49	TRUS	28/11/2002	0	0	0	0	0
50	WOMF	13/12/2004	0	0	0	0	0

LAMPIRAN 4 : Data Perhitungan CETR

NO	KODE SAHAM	PEMBAYARAN PAJAK					LABA SEBELUM PAJAK					CETR				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	ABDA	60.482.501.000	38.318.282.000	72.219.274.000	33.729.893.000	18.124.764.000	79.923.584.000	160.874.837.000	174.699.981.000	105.991.095.000	68.578.074.000	0,757	0,238	0,413	0,318	0,264
2	ADMF	734.028.000.000	798.008.000.000	558.940.000.000	654.018.000.000	897.180.000.000	2.879.136.000.000	1.476.435.000.000	1.598.203.000.000	2.039.724.000.000	2.472.669.000.000	0,255	0,540	0,350	0,321	0,363
3	AMAG	13.728.904.000	18.262.698.000	73.335.721.000	43.611.375.000	51.532.601.000	78.933.529.000	123.855.201.000	161.169.331.000	192.812.423.000	157.783.030.000	0,174	0,147	0,455	0,226	0,327
4	APIC	12.573.374.579	13.313.292.996	2.849.276.109	15.993.725.141	4.998.234.297	113.228.232.421	131.911.926.462	112.587.381.009	163.126.522.313	113.021.263.471	0,111	0,101	0,025	0,098	0,044
5	ASBI	474.665.000	105.715.000	32.419.000	830.400.000	991.066.000	7.942.000.000	18.627.452.000	12.315.070.000	5.978.020.000	6.818.059.000	0,060	0,006	0,003	0,139	0,145
6	ASDM	4.449.315.000	2.464.317.000	378.047.000	1.160.230.000	5.148.359.000	31.235.084.000	29.025.657.000	21.247.953.000	23.723.431.000	24.681.163.000	0,142	0,085	0,018	0,049	0,209
7	ASRM	23.039.637.324	20.192.559.774	13.206.104.707	11.597.104.029	12.867.320.688	75.010.199.318	76.829.288.523	77.767.898.297	90.081.897.136	106.229.973.998	0,307	0,263	0,170	0,129	0,121
8	BACA	27.438.000.000	17.545.000.000	13.909.000.000	9.315.000.000	28.873.000.000	23.951.000.000	78.959.000.000	48.694.000.000	41.444.000.000	130.640.000.000	1,146	0,222	0,286	0,225	0,221
9	BBCA	7.909.355.000.000	6.932.987.000.000	8.525.496.000.000	10.107.569.000.000	11.869.562.000.000	36.288.998.000.000	33.568.507.000.000	38.841.174.000.000	50.467.033.000.000	60.179.757.000.000	0,218	0,207	0,219	0,200	0,197
10	BBLD	17.314.000.000	10.475.000.000	1.718.000.000	18.225.000.000	33.433.000.000	78.389.000.000	27.212.000.000	34.803.000.000	112.942.000.000	132.140.000.000	0,221	0,385	0,049	0,161	0,253
11	BBMD	87.162.428.061	86.612.571.440	144.906.861.440	151.127.656.680	117.493.990.460	330.773.591.197	419.976.181.196	665.573.085.996	670.434.882.830	535.114.381.542	0,264	0,206	0,218	0,225	0,220
12	BBNI	4.082.687.000.000	1.544.212.000.000	3.075.099.000.000	4.452.098.000.000	5.151.648.000.000	19.369.106.000.000	5.112.153.000.000	12.550.987.000.000	22.686.708.000.000	25.639.738.000.000	0,211	0,302	0,245	0,196	0,201
13	BBRI	9.357.307.000.000	5.936.444.000.000	11.164.431.000.000	15.762.408.000.000	14.279.292.000.000	43.364.053.000.000	29.993.406.000.000	40.992.065.000.000	64.596.701.000.000	76.429.712.000.000	0,216	0,198	0,272	0,244	0,187
14	BBTN	590.027.000.000	341.466.000.000	820.461.000.000	1.001.324.000.000	1.020.952.000.000	411.062.000.000	2.270.857.000.000	2.993.320.000.000	3.875.690.000.000	4.380.210.000.000	1,435	0,150	0,274	0,258	0,233
15	BCAP	50.599.000.000	29.736.000.000	20.178.000.000	17.316.000.000	24.368.000.000	82.312.000.000	84.614.000.000	167.047.000.000	278.079.000.000	156.615.000.000	0,615	0,351	0,121	0,062	0,156
16	BDMN	1.349.987.000.000	957.194.000.000	668.788.000.000	691.986.000.000	781.759.000.000	5.487.790.000.000	2.067.076.000.000	2.279.920.000.000	4.404.634.000.000	4.693.727.000.000	0,246	0,463	0,293	0,157	0,167
17	BFIN	394.488.000.000	233.809.000.000	237.864.000.000	346.829.000.000	400.126.000.000	1.092.253.000.000	869.996.000.000	1.410.958.000.000	2.238.681.000.000	2.025.252.000.000	0,361	0,269	0,169	0,155	0,198

NO	KODE SAHAM	PEMBAYARAN PAJAK					LABA SEBELUM PAJAK					CETR				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
18	BGTG	7.907.000.000	3.921.000.000	10.882.000.000	15.693.000.000	36.362.000.000	14.526.000.000	5.002.000.000	14.651.000.000	57.424.000.000	128.784.000.000	0,544	0,784	0,743	0,273	0,282
19	BINA	7.466.000.000	2.614.000.000	19.358.000.000	52.102.000.000	66.867.000.000	9.940.000.000	28.621.000.000	50.177.000.000	202.853.000.000	267.531.000.000	0,751	0,091	0,386	0,257	0,250
20	BJBR	408.788.000.000	349.418.000.000	480.846.000.000	563.340.000.000	459.714.000.000	1.977.962.000.000	2.168.028.000.000	2.587.582.000.000	2.835.618.000.000	2.126.367.000.000	0,207	0,161	0,186	0,199	0,216
21	BJTM	581.512.000.000	17.367.000.000	378.098.000.000	389.372.000.000	368.455.000.000	1.864.133.000.000	1.507.369.000.000	1.937.974.000.000	2.030.049.000.000	1.892.743.000.000	0,312	0,012	0,195	0,192	0,195
22	BMAS	24.672.699.000	19.826.301.000	23.152.561.000	33.497.791.000	25.773.121.000	80.440.261.000	89.554.695.000	101.542.031.000	151.070.086.000	83.823.886.000	0,307	0,221	0,228	0,222	0,307
23	BMRI	7.551.004.000.000	4.629.345.000.000	8.301.777.000.000	11.909.631.000.000	13.729.286.000.000	36.441.440.000.000	23.298.041.000.000	38.358.421.000.000	56.377.726.000.000	74.684.881.000.000	0,207	0,199	0,216	0,211	0,184
24	BNBA	21.373.854.618	15.735.965.612	19.517.645.180	12.557.267.360	23.796.965.500	70.829.124.380	53.471.358.172	59.072.747.958	50.365.811.993	57.246.689.224	0,302	0,294	0,330	0,249	0,416
25	BNGA	1.277.823.000.000	689.519.000.000	1.151.728.000.000	1.703.339.000.000	1.662.666.000.000	4.953.897.000.000	2.947.420.000.000	5.191.098.000.000	6.579.332.000.000	8.357.272.000.000	0,258	0,234	0,222	0,259	0,199
26	BNII	545.845.000.000	454.000.000.000	507.447.000.000	454.965.000.000	671.971.000.000	2.599.094.000.000	1.818.645.000.000	2.175.516.000.000	2.040.226.000.000	2.354.674.000.000	0,210	0,250	0,233	0,223	0,285
27	BNLI	458.859.000.000	8.630.000.000	34.520.000.000	692.779.000.000	702.904.000.000	2.010.735.000.000	1.615.349.000.000	1.565.521.000.000	2.614.013.000.000	3.350.120.000.000	0,228	0,005	0,022	0,265	0,210
28	BPFI	22.850.327.316	13.551.628.037	12.232.702.108	13.268.132.841	14.849.923.199	97.096.113.884	53.553.686.485	59.353.233.475	64.805.197.550	106.965.007.079	0,235	0,253	0,206	0,205	0,139
29	BRIS	61.519.000.000	943.242.000.000	1.344.080.000.000	1.446.720.000.000	1.855.197.000.000	116.865.000.000	3.079.399.000.000	4.062.208.000.000	5.656.208.000.000	7.589.202.000.000	0,526	0,306	0,331	0,256	0,244
30	BSIM	7.523.000.000	33.586.000.000	55.055.000.000	53.076.000.000	189.791.000.000	81.893.000.000	116.600.000.000	159.518.000.000	277.211.000.000	73.578.000.000	0,092	0,288	0,345	0,191	2,579
31	BTPN	1.262.205.000.000	458.531.000.000	1.065.165.000.000	1.163.421.000.000	889.965.000.000	4.018.922.000.000	2.633.076.000.000	4.007.172.000.000	4.657.319.000.000	3.457.682.000.000	0,314	0,174	0,266	0,250	0,257
32	BTPS	562.722.000.000	267.730.000.000	434.535.000.000	510.301.000.000	420.516.000.000	1.878.249.000.000	1.124.296.000.000	1.877.473.000.000	2.282.394.000.000	1.379.894.000.000	0,300	0,238	0,231	0,224	0,305
33	CASA	10.390.000.000	16.222.000.000	12.704.000.000	13.978.000.000	29.464.000.000	23.786.000.000	127.104.000.000	60.643.000.000	49.588.000.000	128.802.000.000	0,437	0,128	0,209	0,282	0,229
34	CFIN	152.282.147	41.036.940	22.790.252	50.653.235	236.580.280	486.666.547	60.533.160	39.694.721	399.500.714	1.035.010.028	0,313	0,678	0,574	0,127	0,229
35	FUJI	257.020.568	1.449.009.385	1.238.321.036	1.665.437.735	1.161.236.449	6.911.878.077	5.522.063.920	11.097.646.739	10.347.494.145	3.915.435.094	0,037	0,262	0,112	0,161	0,297

NO	KODE SAHAM	PEMBAYARAN PAJAK					LABA SEBELUM PAJAK					CETR				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
36	LPGI	14.020.402,951	10.990.468,461	16.847.058,431	5.414.626,080	1.523.406,561	87.774.030,433	111.914.336,371	147.263.305,972	98.598.182,213	14.873.855,445	0,160	0,098	0,114	0,055	0,102
37	MAYA	273.685.000,000	146.438.000,000	24.257.000,000	63.137.000,000	26.528.000,000	714.688.000,000	104.448.000,000	72.211.000,000	53.787.000,000	54.609.000,000	0,383	1,402	0,336	1,174	0,486
28	MCOR	49.581.000,000	24.175.000,000	38.022.000,000	61.155.000,000	99.413.000,000	112.336.000,000	63.703.000,000	104.014.000,000	175.742.000,000	309.801.000,000	0,441	0,379	0,366	0,348	0,321
39	MEGA	433.624.000,000	715.110.000,000	845.084.000,000	925.476.000,000	912.589.000,000	2.508.411.000,000	3.715.053.000,000	4.952.616.000,000	5.028.070.000,000	4.342.729.000,000	0,173	0,192	0,171	0,184	0,210
40	MFIN	102.667.000,000	66.196.000,000	97.852.000,000	184.573.000,000	136.413.000,000	513.860.000,000	233.486.000,000	614.038.000,000	839.177.000,000	527.278.000,000	0,200	0,284	0,159	0,220	0,259
41	NISP	909.543.000,000	1.039.699.000,000	854.028.000,000	1.078.446.000,000	1.178.028.000,000	3.891.439.000,000	2.784.855.000,000	3.203.792.000,000	4.218.016.000,000	5.184.463.000,000	0,234	0,373	0,267	0,256	0,227
42	PANS	20.056.897,185	14.470.032,521	43.103.664,914	44.043.137,506	30.740.568,928	160.982.549,071	113.535.703,354	199.109.762,411	294.497.708,325	170.446.520,240	0,125	0,127	0,216	0,150	0,180
43	PNBN	1.131.310.000,000	969.218.000,000	702.196.000,000	751.503.000,000	816.417.000,000	4.595.617.000,000	4.071.792.000,000	2.514.336.000,000	4.088.893.000,000	3.775.726.000,000	0,246	0,238	0,279	0,184	0,216
44	SDRA	172.272.000,000	147.145.000,000	199.513.000,000	262.272.000,000	212.754.000,000	672.866.000,000	692.054.000,000	820.650.000,000	1.113.455.000,000	908.101.000,000	0,256	0,213	0,243	0,236	0,234
45	SMMA	86.759.000,000	106.916.000,000	134.997.000,000	186.697.000,000	373.406.000,000	5.181.765.000,000	650.168.000,000	1.139.090.000,000	1.247.315.000,000	1.284.257.000,000	0,017	0,164	0,119	0,150	0,291
46	STAR	5.601.571,015	9.691.732	73.717.395	91.414.639	107.443.535	6.769.612.827	5.817.863.143	10.586.803.657	1.840.591.240	2.821.199.603	0,827	0,002	0,007	0,050	0,038
47	TIFA	11.802.260,000	6.922.450,000	9.231.954,000	7.847.091,000	17.060.320,000	43.774.068,000	24.514.794,000	32.607.240,000	72.555.137,000	74.844.627,000	0,270	0,282	0,283	0,108	0,228
48	TRIM	30.841.336,000	30.265.536,000	23.510.805,000	31.307.036,000	40.536.164,000	87.752.805,000	46.333.031,000	62.219.455,000	205.760.553,000	207.965.195,000	0,351	0,653	0,378	0,152	0,195
49	TRUS	5.302.163,653	9.972.391,387	5.453.613,704	5.281.773,404	6.540.665,681	21.795.973,629	23.047.815,998	29.657.180,410	29.453.436,418	32.859.734,868	0,243	0,433	0,184	0,179	0,199
50	WOMF	62.302.000,000	85.647.000,000	19.103.000,000	55.095.000,000	73.935.000,000	371.066.000,000	93.955.000,000	155.244.000,000	282.249.000,000	322.609.000,000	0,168	0,912	0,123	0,195	0,229

LAMPIRAN 5 : Data Siap Olah

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
1	ABDA	2019	0,750	0,623	0	0,757
		2020	0,750	0,623	0	0,238
		2021	0,750	0,623	0	0,413
		2022	0,750	0,948	0	0,318
		2023	0,750	0,948	0	0,264
2	ADMF	2019	0,333	0,921	0	0,255
		2020	0,333	0,921	0	0,540
		2021	0,333	0,921	0	0,350
		2022	0,333	0,921	0	0,321
		2023	0,333	0,921	0	0,363
3	AMAG	2019	0,500	0,878	0	0,174
		2020	0,500	0,878	0	0,147
		2021	0,500	0,878	0	0,455
		2022	0,500	0,878	0	0,226
		2023	0,500	0,878	0	0,327
4	APIC	2019	0,500	0,543	0	0,111
		2020	0,500	0,510	0	0,101
		2021	0,500	0,510	0	0,025
		2022	0,500	0,426	0	0,098
		2023	0,500	0,372	0	0,044
5	ASBI	2019	0,600	0,818	1	0,060
		2020	0,600	0,822	1	0,006
		2021	0,600	0,822	1	0,003
		2022	0,600	0,822	1	0,139
		2023	0,600	0,822	1	0,145
6	ASDM	2019	0,500	0,733	0	0,142
		2020	0,500	0,846	0	0,085
		2021	0,500	0,846	0	0,018
		2022	0,500	0,846	0	0,049
		2023	0,333	0,846	0	0,209
7	ASRM	2019	0,750	0,239	0	0,307
		2020	0,667	0,206	0	0,263
		2021	0,667	0,206	0	0,170
		2022	0,667	0,206	0	0,129
		2023	0,500	0,206	0	0,121
8	BACA	2019	0,667	0,425	0	1,146
		2020	0,667	0,396	0	0,222

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
		2021	0,667	0,396	0	0,286
		2022	0,667	0,747	0	0,225
		2023	0,667	0,897	0	0,221
9	BBCA	2019	0,600	0,549	0	0,218
		2020	0,600	0,549	0	0,207
		2021	0,600	0,549	0	0,219
		2022	0,600	0,549	0	0,200
		2023	0,600	0,549	0	0,197
10	BBLD	2019	0,500	0,732	0	0,221
		2020	0,500	0,730	0	0,385
		2021	0,500	0,786	0	0,049
		2022	0,500	0,676	0	0,161
		2023	0,500	0,727	0	0,253
11	BBMD	2019	0,500	0,894	0	0,264
		2020	0,500	0,910	0	0,206
		2021	0,500	0,910	0	0,218
		2022	0,500	0,910	0	0,225
		2023	0,750	0,937	0	0,220
12	BBNI	2019	0,625	0,962	0	0,211
		2020	0,750	0,932	0	0,302
		2021	0,700	0,948	0	0,245
		2022	0,700	0,958	0	0,196
		2023	0,545	0,957	0	0,201
13	BBRI	2019	0,625	0,989	0	0,216
		2020	0,600	0,980	0	0,198
		2021	0,600	0,974	0	0,272
		2022	0,700	0,980	0	0,244
		2023	0,700	0,981	0	0,187
14	BBTN	2019	0,500	0,947	0	1,435
		2020	0,500	0,896	0	0,150
		2021	0,571	0,909	0	0,274
		2022	0,625	0,897	0	0,258
		2023	0,625	0,863	0	0,233
15	BCAP	2019	0,333	0,954	1	0,615
		2020	0,333	0,954	1	0,351
		2021	0,333	0,916	1	0,121
		2022	0,333	0,901	1	0,062
		2023	0,500	0,876	1	0,156
16	BDMN	2019	0,500	0,941	0	0,246

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
		2020	0,375	0,925	0	0,463
		2021	0,500	0,925	0	0,293
		2022	0,500	0,925	0	0,157
		2023	0,500	0,925	0	0,167
17	BFIN	2019	0,429	0,590	0	0,361
		2020	0,429	0,581	0	0,269
		2021	0,333	0,543	0	0,169
		2022	0,400	0,540	0	0,155
		2023	0,400	0,592	0	0,198
18	BGTG	2019	0,667	0,856	0	0,544
		2020	0,667	0,856	0	0,784
		2021	0,667	0,810	0	0,743
		2022	0,333	0,895	0	0,273
		2023	0,500	0,896	0	0,282
19	BINA	2019	0,667	0,874	0	0,751
		2020	0,667	0,853	0	0,091
		2021	0,667	0,844	0	0,386
		2022	1,000	0,979	0	0,257
		2023	1,000	0,988	0	0,250
20	BJBR	2019	0,600	0,754	0	0,207
		2020	0,600	0,754	0	0,161
		2021	0,667	0,754	0	0,186
		2022	0,600	0,754	0	0,199
		2023	0,500	0,705	0	0,216
21	BJTM	2019	0,500	0,795	0	0,312
		2020	0,500	0,795	0	0,012
		2021	0,667	0,795	0	0,195
		2022	0,600	0,795	0	0,192
		2023	0,750	0,795	0	0,195
22	BMAS	2019	0,500	0,956	0	0,307
		2020	0,500	0,956	0	0,221
		2021	0,500	0,956	0	0,228
		2022	0,600	0,997	0	0,222
		2023	0,600	0,999	0	0,307
23	BMRI	2019	0,538	0,991	0	0,207
		2020	0,500	0,984	0	0,199
		2021	0,500	0,987	0	0,216
		2022	0,500	0,989	0	0,211
		2023	0,545	0,986	0	0,184

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
24	BNBA	2019	0,667	0,909	0	0,302
		2020	0,667	0,909	0	0,294
		2021	0,667	0,909	0	0,330
		2022	0,500	0,916	0	0,249
		2023	0,500	0,916	0	0,416
25	BNGA	2019	0,500	0,925	0	0,258
		2020	0,500	0,925	0	0,234
		2021	0,500	0,925	0	0,222
		2022	0,500	0,925	0	0,259
		2023	0,571	0,925	0	0,199
26	BNII	2019	0,500	0,973	0	0,210
		2020	0,500	0,973	0	0,250
		2021	0,571	0,973	0	0,233
		2022	0,500	0,973	0	0,223
		2023	0,500	0,877	0	0,285
27	BNLI	2019	0,500	0,891	1	0,228
		2020	0,500	0,987	1	0,005
		2021	0,571	0,987	1	0,022
		2022	0,500	0,987	1	0,265
		2023	0,500	0,987	0	0,210
28	BPFI	2019	0,333	0,804	0	0,235
		2020	0,333	0,804	0	0,253
		2021	0,333	0,803	0	0,206
		2022	0,333	0,942	0	0,205
		2023	0,500	0,967	0	0,139
29	BRIS	2019	0,556	0,817	0	0,526
		2020	0,556	0,799	0	0,306
		2021	0,556	0,929	0	0,331
		2022	0,444	0,901	0	0,256
		2023	0,444	0,901	0	0,244
30	BSIM	2019	0,667	0,627	0	0,092
		2020	0,667	0,616	0	0,288
		2021	0,667	0,616	0	0,345
		2022	0,667	0,631	0	0,191
		2023	0,667	0,629	0	2,579
31	BTPN	2019	0,600	0,936	0	0,314
		2020	0,600	0,936	0	0,174
		2021	0,600	0,936	0	0,266
		2022	0,500	0,936	0	0,250

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
		2023	0,500	0,911	0	0,257
32	BTPS	2019	0,500	0,700	0	0,300
		2020	0,500	0,700	0	0,238
		2021	0,500	0,700	0	0,231
		2022	0,500	0,700	0	0,224
		2023	0,750	0,700	0	0,305
33	CASA	2019	0,500	0,750	0	0,437
		2020	0,500	0,745	0	0,128
		2021	0,500	0,695	0	0,209
		2022	0,500	0,671	0	0,282
		2023	0,500	0,671	0	0,229
34	CFIN	2019	0,500	0,597	0	0,313
		2020	0,333	0,597	0	0,678
		2021	0,333	0,597	0	0,574
		2022	0,333	0,597	0	0,127
		2023	0,333	0,597	0	0,229
35	FUJI	2019	0,333	0,894	0	0,037
		2020	0,333	0,910	0	0,262
		2021	0,333	0,899	0	0,112
		2022	0,333	0,894	0	0,161
		2023	0,333	0,894	0	0,297
36	LPGI	2019	0,667	0,856	0	0,160
		2020	0,667	0,856	0	0,098
		2021	0,667	0,856	0	0,114
		2022	0,667	0,856	0	0,055
		2023	0,400	0,974	0	0,102
37	MAYA	2019	0,571	0,870	0	0,383
		2020	0,500	0,870	0	1,402
		2021	0,333	0,872	0	0,336
		2022	0,333	0,864	0	1,174
		2023	0,333	0,749	0	0,486
38	MCOR	2019	0,500	0,600	0	0,441
		2020	0,500	0,682	0	0,379
		2021	0,500	0,682	0	0,366
		2022	0,500	0,682	0	0,348
		2023	0,500	0,682	0	0,321
39	MEGA	2019	0,600	0,580	0	0,173
		2020	0,600	0,641	0	0,192
		2021	0,600	0,637	0	0,171

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
		2022	0,500	0,580	0	0,184
		2023	0,600	0,580	0	0,210
40	MFIN	2019	0,333	0,704	0	0,200
		2020	0,333	0,704	0	0,284
		2021	0,500	0,704	0	0,159
		2022	0,500	0,704	0	0,220
		2023	0,500	0,704	0	0,259
41	NISP	2019	0,667	0,851	0	0,234
		2020	0,625	0,851	0	0,373
		2021	0,625	0,851	0	0,267
		2022	0,500	0,851	0	0,256
		2023	0,500	0,851	0	0,227
42	PANS	2019	0,400	0,590	0	0,125
		2020	0,400	0,590	0	0,127
		2021	0,400	0,590	0	0,216
		2022	0,400	0,590	0	0,150
		2023	0,400	0,590	0	0,180
43	PNBN	2019	0,500	0,849	0	0,246
		2020	0,500	0,849	0	0,238
		2021	0,500	0,849	0	0,279
		2022	0,500	0,849	0	0,184
		2023	0,500	0,849	0	0,216
44	SDRA	2019	0,500	0,859	0	0,256
		2020	0,500	0,859	0	0,213
		2021	0,667	0,888	0	0,243
		2022	0,500	0,888	0	0,236
		2023	0,500	0,956	0	0,234
45	SMMA	2019	0,400	0,692	0	0,017
		2020	0,400	0,655	0	0,164
		2021	0,400	0,589	0	0,119
		2022	0,400	0,513	0	0,150
		2023	0,400	0,517	0	0,291
46	STAR	2019	0,500	0,960	0	0,827
		2020	0,500	0,960	0	0,002
		2021	0,500	0,976	0	0,007
		2022	0,500	0,957	0	0,050
		2023	0,500	0,970	0	0,038
47	TIFA	2019	0,500	0,743	0	0,270
		2020	0,500	0,996	0	0,282

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
		2021	0,500	0,996	0	0,283
		2022	0,667	0,996	0	0,108
		2023	0,667	0,996	0	0,228
48	TRIM	2019	0,667	0,905	0	0,351
		2020	0,667	0,904	0	0,653
		2021	0,667	0,908	0	0,378
		2022	0,500	0,350	0	0,152
		2023	0,500	0,362	0	0,195
49	TRUS	2019	0,500	0,673	0	0,243
		2020	0,500	0,673	0	0,433
		2021	0,500	0,673	0	0,184
		2022	0,500	0,673	0	0,179
		2023	0,500	0,673	0	0,199
50	WOMF	2019	0,400	0,924	0	0,644
		2020	0,400	0,935	0	0,912
		2021	0,400	0,924	0	0,123
		2022	0,400	0,924	0	0,195
		2023	0,667	0,924	0	0,229

LAMPIRAN 6 : Data-Data Yang Dibuang Dari Outlier

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
1	ABDA	2019	0,750	0,623	0	0,757
		2020	0,750	0,623	0	0,238
		2021	0,750	0,623	0	0,413
		2022	0,750	0,948	0	0,318
		2023	0,750	0,948	0	0,264
2	ADMF	2019	0,333	0,921	0	0,255
		2020	0,333	0,921	0	0,540
		2021	0,333	0,921	0	0,350
		2022	0,333	0,921	0	0,321
		2023	0,333	0,921	0	0,363
3	AMAG	2019	0,500	0,878	0	0,174
		2020	0,500	0,878	0	0,147
		2021	0,500	0,878	0	0,455
		2022	0,500	0,878	0	0,226
		2023	0,500	0,878	0	0,327
4	APIC	2019	0,500	0,543	0	0,111
		2020	0,500	0,510	0	0,101
		2021	0,500	0,510	0	0,025
		2022	0,500	0,426	0	0,098
		2023	0,500	0,372	0	0,044
5	ASBI	2019	0,600	0,818	1	0,060
		2020	0,600	0,822	1	0,006
		2021	0,600	0,822	1	0,003
		2022	0,600	0,822	1	0,139
		2023	0,600	0,822	1	0,145
6	ASDM	2019	0,500	0,733	0	0,142
		2020	0,500	0,846	0	0,085
		2021	0,500	0,846	0	0,018
		2022	0,500	0,846	0	0,049
		2023	0,333	0,846	0	0,209
7	ASRM	2019	0,750	0,239	0	0,307
		2020	0,667	0,206	0	0,263
		2021	0,667	0,206	0	0,170
		2022	0,667	0,206	0	0,129
		2023	0,500	0,206	0	0,121
8	BACA	2019	0,667	0,425	0	1,146
		2020	0,667	0,396	0	0,222

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
		2021	0,667	0,396	0	0,286
		2022	0,667	0,747	0	0,225
		2023	0,667	0,897	0	0,221
9	BBCA	2019	0,600	0,549	0	0,218
		2020	0,600	0,549	0	0,207
		2021	0,600	0,549	0	0,219
		2022	0,600	0,549	0	0,200
		2023	0,600	0,549	0	0,197
10	BBLD	2019	0,500	0,732	0	0,221
		2020	0,500	0,730	0	0,385
		2021	0,500	0,786	0	0,049
		2022	0,500	0,676	0	0,161
		2023	0,500	0,727	0	0,253
11	BBMD	2019	0,500	0,894	0	0,264
		2020	0,500	0,910	0	0,206
		2021	0,500	0,910	0	0,218
		2022	0,500	0,910	0	0,225
		2023	0,750	0,937	0	0,220
12	BBNI	2019	0,625	0,962	0	0,211
		2020	0,750	0,932	0	0,302
		2021	0,700	0,948	0	0,245
		2022	0,700	0,958	0	0,196
		2023	0,545	0,957	0	0,201
13	BBRI	2019	0,625	0,989	0	0,216
		2020	0,600	0,980	0	0,198
		2021	0,600	0,974	0	0,272
		2022	0,700	0,980	0	0,244
		2023	0,700	0,981	0	0,187
14	BBTN	2019	0,500	0,947	0	1,435
		2020	0,500	0,896	0	0,150
		2021	0,571	0,909	0	0,274
		2022	0,625	0,897	0	0,258
		2023	0,625	0,863	0	0,233
15	BCAP	2019	0,333	0,954	1	0,615
		2020	0,333	0,954	1	0,351
		2021	0,333	0,916	1	0,121
		2022	0,333	0,901	1	0,062
		2023	0,500	0,876	1	0,156
16	BDMN	2019	0,500	0,941	0	0,246

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
		2020	0,375	0,925	0	0,463
		2021	0,500	0,925	0	0,293
		2022	0,500	0,925	0	0,157
		2023	0,500	0,925	0	0,167
17	BFIN	2019	0,429	0,590	0	0,361
		2020	0,429	0,581	0	0,269
		2021	0,333	0,543	0	0,169
		2022	0,400	0,540	0	0,155
		2023	0,400	0,592	0	0,198
18	BGTG	2019	0,667	0,856	0	0,544
		2020	0,667	0,856	0	0,784
		2021	0,667	0,810	0	0,743
		2022	0,333	0,895	0	0,273
		2023	0,500	0,896	0	0,282
19	BINA	2019	0,667	0,874	0	0,751
		2020	0,667	0,853	0	0,091
		2021	0,667	0,844	0	0,386
		2022	1,000	0,979	0	0,257
		2023	1,000	0,988	0	0,250
20	BJBR	2019	0,600	0,754	0	0,207
		2020	0,600	0,754	0	0,161
		2021	0,667	0,754	0	0,186
		2022	0,600	0,754	0	0,199
		2023	0,500	0,705	0	0,216
21	BJTM	2019	0,500	0,795	0	0,312
		2020	0,500	0,795	0	0,012
		2021	0,667	0,795	0	0,195
		2022	0,600	0,795	0	0,192
		2023	0,750	0,795	0	0,195
22	BMAS	2019	0,500	0,956	0	0,307
		2020	0,500	0,956	0	0,221
		2021	0,500	0,956	0	0,228
		2022	0,600	0,997	0	0,222
		2023	0,600	0,999	0	0,307
23	BMRI	2019	0,538	0,991	0	0,207
		2020	0,500	0,984	0	0,199
		2021	0,500	0,987	0	0,216
		2022	0,500	0,989	0	0,211
		2023	0,545	0,986	0	0,184

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
24	BNBA	2019	0,667	0,909	0	0,302
		2020	0,667	0,909	0	0,294
		2021	0,667	0,909	0	0,330
		2022	0,500	0,916	0	0,249
		2023	0,500	0,916	0	0,416
25	BNGA	2019	0,500	0,925	0	0,258
		2020	0,500	0,925	0	0,234
		2021	0,500	0,925	0	0,222
		2022	0,500	0,925	0	0,259
		2023	0,571	0,925	0	0,199
26	BNII	2019	0,500	0,973	0	0,210
		2020	0,500	0,973	0	0,250
		2021	0,571	0,973	0	0,233
		2022	0,500	0,973	0	0,223
		2023	0,500	0,877	0	0,285
27	BNLI	2019	0,500	0,891	1	0,228
		2020	0,500	0,987	1	0,005
		2021	0,571	0,987	1	0,022
		2022	0,500	0,987	1	0,265
		2023	0,500	0,987	0	0,210
28	BPFI	2019	0,333	0,804	0	0,235
		2020	0,333	0,804	0	0,253
		2021	0,333	0,803	0	0,206
		2022	0,333	0,942	0	0,205
		2023	0,500	0,967	0	0,139
29	BRIS	2019	0,556	0,817	0	0,526
		2020	0,556	0,799	0	0,306
		2021	0,556	0,929	0	0,331
		2022	0,444	0,901	0	0,256
		2023	0,444	0,901	0	0,244
30	BSIM	2019	0,667	0,627	0	0,092
		2020	0,667	0,616	0	0,288
		2021	0,667	0,616	0	0,345
		2022	0,667	0,631	0	0,191
		2023	0,667	0,629	0	2,579
31	BTPN	2019	0,600	0,936	0	0,314
		2020	0,600	0,936	0	0,174
		2021	0,600	0,936	0	0,266
		2022	0,500	0,936	0	0,250

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
		2023	0,500	0,911	0	0,257
32	BTPS	2019	0,500	0,700	0	0,300
		2020	0,500	0,700	0	0,238
		2021	0,500	0,700	0	0,231
		2022	0,500	0,700	0	0,224
		2023	0,750	0,700	0	0,305
33	CASA	2019	0,500	0,750	0	0,437
		2020	0,500	0,745	0	0,128
		2021	0,500	0,695	0	0,209
		2022	0,500	0,671	0	0,282
		2023	0,500	0,671	0	0,229
34	CFIN	2019	0,500	0,597	0	0,313
		2020	0,333	0,597	0	0,678
		2021	0,333	0,597	0	0,574
		2022	0,333	0,597	0	0,127
		2023	0,333	0,597	0	0,229
35	FUJI	2019	0,333	0,894	0	0,037
		2020	0,333	0,910	0	0,262
		2021	0,333	0,899	0	0,112
		2022	0,333	0,894	0	0,161
		2023	0,333	0,894	0	0,297
36	LPGI	2019	0,667	0,856	0	0,160
		2020	0,667	0,856	0	0,098
		2021	0,667	0,856	0	0,114
		2022	0,667	0,856	0	0,055
		2023	0,400	0,974	0	0,102
37	MAYA	2019	0,571	0,870	0	0,383
		2020	0,500	0,870	0	1,402
		2021	0,333	0,872	0	0,336
		2022	0,333	0,864	0	1,174
		2023	0,333	0,749	0	0,486
38	MCOR	2019	0,500	0,600	0	0,441
		2020	0,500	0,682	0	0,379
		2021	0,500	0,682	0	0,366
		2022	0,500	0,682	0	0,348
		2023	0,500	0,682	0	0,321
39	MEGA	2019	0,600	0,580	0	0,173
		2020	0,600	0,641	0	0,192
		2021	0,600	0,637	0	0,171

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
		2022	0,500	0,580	0	0,184
		2023	0,600	0,580	0	0,210
40	MFIN	2019	0,333	0,704	0	0,200
		2020	0,333	0,704	0	0,284
		2021	0,500	0,704	0	0,159
		2022	0,500	0,704	0	0,220
		2023	0,500	0,704	0	0,259
41	NISP	2019	0,667	0,851	0	0,234
		2020	0,625	0,851	0	0,373
		2021	0,625	0,851	0	0,267
		2022	0,500	0,851	0	0,256
		2023	0,500	0,851	0	0,227
42	PANS	2019	0,400	0,590	0	0,125
		2020	0,400	0,590	0	0,127
		2021	0,400	0,590	0	0,216
		2022	0,400	0,590	0	0,150
		2023	0,400	0,590	0	0,180
43	PNBN	2019	0,500	0,849	0	0,246
		2020	0,500	0,849	0	0,238
		2021	0,500	0,849	0	0,279
		2022	0,500	0,849	0	0,184
		2023	0,500	0,849	0	0,216
44	SDRA	2019	0,500	0,859	0	0,256
		2020	0,500	0,859	0	0,213
		2021	0,667	0,888	0	0,243
		2022	0,500	0,888	0	0,236
		2023	0,500	0,956	0	0,234
45	SMMA	2019	0,400	0,692	0	0,017
		2020	0,400	0,655	0	0,164
		2021	0,400	0,589	0	0,119
		2022	0,400	0,513	0	0,150
		2023	0,400	0,517	0	0,291
46	STAR	2019	0,500	0,960	0	0,827
		2020	0,500	0,960	0	0,002
		2021	0,500	0,976	0	0,007
		2022	0,500	0,957	0	0,050
		2023	0,500	0,970	0	0,038
47	TIFA	2019	0,500	0,743	0	0,270
		2020	0,500	0,996	0	0,282

NO	KODE SAHAM	PERIODE	KD	KI	KRF	CTER
			X1	X2	X3	Y
		2021	0,500	0,996	0	0,283
		2022	0,667	0,996	0	0,108
		2023	0,667	0,996	0	0,228
48	TRIM	2019	0,667	0,905	0	0,351
		2020	0,667	0,904	0	0,653
		2021	0,667	0,908	0	0,378
		2022	0,500	0,350	0	0,152
		2023	0,500	0,362	0	0,195
49	TRUS	2019	0,500	0,673	0	0,243
		2020	0,500	0,673	0	0,433
		2021	0,500	0,673	0	0,184
		2022	0,500	0,673	0	0,179
		2023	0,500	0,673	0	0,199
50	WOMF	2019	0,400	0,924	0	0,644
		2020	0,400	0,935	0	0,912
		2021	0,400	0,924	0	0,123
		2022	0,400	0,924	0	0,195
		2023	0,667	0,924	0	0,229

LAMPIRAN 7 : Hasil Olah Data Sebelum Dilakukan Outlier

Uji deskriptif

Date: 10/22/24 Time: 06:38

Sample: 2019 2023

	KD_X1	KI_X2	KRF_X3	CETR_Y
Mean	0.528496	0.795620	0.084000	0.271224
Median	0.500000	0.856000	0.000000	0.226500
Maximum	1.000000	0.999000	1.000000	2.579000
Minimum	0.333000	0.206000	0.000000	0.002000
Std. Dev.	0.118703	0.174082	0.277944	0.243410
Skewness	0.432415	-1.176712	2.999411	4.899628
Kurtosis	3.862810	4.119189	9.996465	38.79721

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.623887	(49,197)	0.0110
Cross-section Chi-square	84.815471	49	0.0011

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.534998	3	0.9111

Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	5.765977 (0.0163)	0.426231 (0.5138)	6.192208 (0.0128)

Regresi data panel REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.254542	0.115716	2.199714	0.0288
KD_X1	0.033822	0.147899	0.228682	0.8193
KI_X2	0.009888	0.104472	0.094650	0.9247
KRF_X3	-0.107855	0.065881	-1.637131	0.1029
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.086618	0.1254
Idiosyncratic random			0.228780	0.8746
Weighted Statistics				
R-squared	0.011938	Mean dependent var	0.207003	
Adjusted R-squared	-0.000112	S.D. dependent var	0.227618	
S.E. of regression	0.227631	Sum squared resid	12.74673	
F-statistic	0.990702	Durbin-Watson stat	1.608008	
Prob(F-statistic)	0.397789			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.018657	Mean dependent var	0.271224	
Sum squared resid	14.47759	Durbin-Watson stat	1.415763	

Uji Multikolinearitas

	KD_X1	KI_X2	KRF_X3
KD_X1	1.000000	-0.003476	-0.178013
KI_X2	-0.003476	1.000000	-0.016602
KRF_X3	-0.178013	-0.016602	1.000000

Uji heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.170038	0.094295	1.803246	0.0726
KD_X1	-0.007239	0.121488	-0.059590	0.9525
KI_X2	-0.047894	0.083942	-0.570566	0.5688
KRF_X3	-0.033900	0.053149	-0.637830	0.5242

Uji f

Weighted Statistics			
R-squared	0.011938	Mean dependent var	0.207003
Adjusted R-squared	-0.000112	S.D. dependent var	0.227618
S.E. of regression	0.227631	Sum squared resid	12.74673
F-statistic	0.990702	Durbin-Watson stat	1.608008
Prob(F-statistic)	0.397789		

Uji t

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.254542	0.115716	2.199714	0.0288
KD_X1	0.033822	0.147899	0.228682	0.8193
KI_X2	0.009888	0.104472	0.094650	0.9247
KRF_X3	-0.107855	0.065881	-1.637131	0.1029

Uji determinasi (adjusted R²)

Weighted Statistics			
R-squared	0.011938	Mean dependent var	0.207003
Adjusted R-squared	-0.000112	S.D. dependent var	0.227618
S.E. of regression	0.227631	Sum squared resid	12.74673
F-statistic	0.990702	Durbin-Watson stat	1.608008
Prob(F-statistic)	0.397789		

LAMPIRAN 8 : Hasil Olah Data Setelah Dilakukan Outlier

Uji deskriptif

Date: 10/22/24 Time: 07:32

Sample: 2019 2023

	KD_X1	KI_X2	KRF_X3	CETR_Y
Mean	0.519905	0.811336	0.095455	0.240850
Median	0.500000	0.856000	0.000000	0.222500
Maximum	0.750000	0.999000	1.000000	0.827000
Minimum	0.333000	0.350000	0.000000	0.002000
Std. Dev.	0.108164	0.151161	0.294512	0.139250
Skewness	0.081556	-0.800172	2.753492	1.571117
Kurtosis	2.631058	2.744567	8.581718	7.179978

Uji chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.470533	(43,173)	0.0000
Cross-section Chi-square	105.326020	43	0.0000

Uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.815566	3	0.8457

Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	21.63063 (0.0000)	3.843373 (0.0499)	25.47400 (0.0000)

Regresi data panel REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.171164	0.079802	2.144849	0.0331
KD_X1	0.100456	0.104262	0.963502	0.3364
KI_X2	0.029712	0.079793	0.372357	0.7100
KRF_X3	-0.069644	0.040862	-1.704370	0.0897
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.068991	0.2456	
Idiosyncratic random		0.120919	0.7544	
Weighted Statistics				
R-squared	0.021859	Mean dependent var	0.148581	
Adjusted R-squared	0.008273	S.D. dependent var	0.120807	
S.E. of regression	0.120306	Sum squared resid	3.126302	
F-statistic	1.609000	Durbin-Watson stat	1.629610	
Prob(F-statistic)	0.188245			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.037621	Mean dependent var	0.240850	
Sum squared resid	4.086764	Durbin-Watson stat	1.246623	

Uji multikolinearitas

	KD_X1	KI_X2	KRF_X3
KD_X1	1.000000	0.157992	-0.183762
KI_X2	0.157992	1.000000	-0.054368
KRF_X3	-0.183762	-0.054368	1.000000

Uji heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.053547	0.059315	0.902756	0.3677
KD_X1	0.105393	0.077447	1.360833	0.1750
KI_X2	-0.022774	0.059326	-0.383881	0.7014
KRF_X3	0.003591	0.030378	0.118196	0.9060

Uji f

Weighted Statistics			
R-squared	0.021859	Mean dependent var	0.148581
Adjusted R-squared	0.008273	S.D. dependent var	0.120807
S.E. of regression	0.120306	Sum squared resid	3.126302
F-statistic	1.609000	Durbin-Watson stat	1.629610
Prob(F-statistic)	0.188245		

Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.171164	0.079802	2.144849	0.0331
KD_X1	0.100456	0.104262	0.963502	0.3364
KL_X2	0.029712	0.079793	0.372357	0.7100
KRF_X3	-0.069644	0.040862	-1.704370	0.0897

Uji determinasi (adjusted R²)

Weighted Statistics			
R-squared	0.021859	Mean dependent var	0.148581
Adjusted R-squared	0.008273	S.D. dependent var	0.120807
S.E. of regression	0.120306	Sum squared resid	3.126302
F-statistic	1.609000	Durbin-Watson stat	1.629610
Prob(F-statistic)	0.188245		